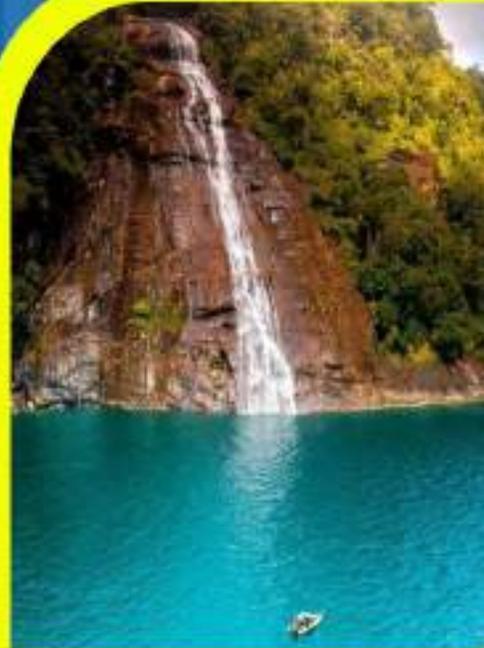




Pemerintah Kabupaten  
Tapanuli Tengah

# RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH  
Kabupaten Tapanuli Tengah



# RKPD

Tahun

# 2026



BUPATI TAPANULI TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
  9. Peraturan Daerah Kabuapten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

**BAB II**  
**PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPd TAHUN 2026**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPd Tahun 2026.
- (2) RKPd Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**Pasal 3**

RKPd Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Pasal 4**

RKPd Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

**Pasal 5**

Sistematika RKPd Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup.

**Pasal 6**

- (1) Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan RPJMD

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, Prioritas Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

- (2) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

#### Pasal 8

RKPD Tahun 2026 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ERWIN HOTMANSAH HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN... NOMOR...

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	I - 1
	1.1. Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 5
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD .....	I - 7
	1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II - 1
	2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II - 1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 30
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 34
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 101
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD .....	II - 103
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II - 103
	2.3.1. Isu Strategis .....	II - 103
	2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II - 104
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional.....	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III - 2
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	III - 4
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	III - 14
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 15
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 15
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 17
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III - 19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 1
	4.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	IV - 6
	4.2.1. Strategi.....	IV - 6
	4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	IV - 12
	4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....	IV - 13
	4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV - 13
	4.3.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 19
	4.3.3. Program Prioritas Daerah.....	IV - 21



4.3.4	Penyelarasan Prioritas Pembangunan.....	IV - 29
4.3.5	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 31
4.3.6	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah .....	IV - 33
4.3.7	Inovasi Kebijakan Pembangunan .....	IV - 35
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	V - 1
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	V - 1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	VI - 1
6.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan .....	VI - 1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI - 14
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI - 14
BAB VII	PENUTUP .....	VII- 1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 2
Tabel 2.2	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 19
Tabel 2.3	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 20
Tabel 2.4	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 21
Tabel 2.5	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 22
Tabel 2.6	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 24
Tabel 2.7	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 25
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	II - 26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021-2023 .....	II - 27
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	II - 28
Tabel 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	II - 29
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2023 .....	II - 29
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2023.....	II - 30
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2019-2023 .....	II - 30
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah) 2018-2023.....	II - 32
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapanuli Tengah 2022 dan 2024 .....	II - 32
Tabel 2.17	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Provinsi Sumatera Utara 2021 - 2023 .....	II - 32



Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023 .....	II - 34
Tabel 2.19	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023.....	II - 36
Tabel 2.20	Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2023 .....	II - 37
Tabel 2.21	Data ePPGBM Tahun 2020-2023 .....	II - 38
Tabel 2.22	Panjang dan Konsisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi Serta Luas Tata Ruang Tahun 2019-2023 .....	II - 39
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2023-2026 .....	II - 45
Tabel 2.24	Perkembangan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal Tahun 2020-2023 .....	II - 46
Tabel 2.25	Perkembangan Penertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2023 .....	II - 46
Tabel 2.26	Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2023.....	II - 46
Tabel 2.27	Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	II - 47
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 .....	II - 62
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023.....	II - 65
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2023 .....	II - 66
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 .....	II - 67
Tabel 2.32	Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2020-2023.....	II - 70
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah .....	II - 70
Tabel 2.34	Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2023.....	II - 72
Tabel 2.35	Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 .....	II - 74
Tabel 2.36	Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.....	II - 74
Tabel 2.37	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2023 .....	II - 79
Tabel 2.38	Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.....	II - 79
Tabel 2.39	Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 81
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 2018-2023.....	II - 83
Tabel 2.41	Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2023.....	II - 85
Tabel 2.42	Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023 .....	II - 85



Tabel 2.43	Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2023.....	II - 85
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023 .....	II - 86
Tabel 2.45	Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 87
Tabel 2.46	Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2023.....	II - 89
Tabel 2.47	Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023 .....	II - 90
Tabel 2.48	Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 90
Tabel 2.49	Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah .....	II - 91
Tabel 2.50	Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2017-2023.....	II - 91
Tabel 2.51	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023 .....	II - 92
Tabel 2.52	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2023 .....	II - 92
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Aset Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2023 .....	II - 93
Tabel 2.54	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Tahun 2017-2023.....	II - 93
Tabel 2.55	Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2023.....	II - 94
Tabel 2.56	Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2023.....	II - 95
Tabel 2.57	Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya Tahun 2017-2023 .....	II - 96
Tabel 2.58	Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2023.....	II - 97
Tabel 2.59	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2023 .....	II - 99
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 .....	II - 100
Tabel 2.61	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dan 2023 .....	II - 101
Tabel 3.1	Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2022 .....	III - 11
Tabel 3.2	Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	III - 17



Tabel 3.3	Jumlah Belanja Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 .....	III - 18
Tabel 3.4	Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 .....	III - 19
Tabel 4.1	Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 .....	IV - 1
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 .....	IV - 4
Tabel 4.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	IV - 7
Tabel 4.4	Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025	IV - 29
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 .....	IV - 43
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 .....	IV - 51
Tabel 5.1	Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 .....	V - 3
Tabel 5.2	Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ....	V - 3
Tabel 6.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2025 .....	VI - 2
Tabel 6.2	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah .....	VI - 3
Tabel 6.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 .....	VI - 14
Tabel 6.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 .....	VI - 15



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I - 6
Gambar 1.2	Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	I - 7
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 1
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023.....	III - 5
Gambar 3.2	Struktur Perekonomian Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan PDRB ADH berlaku (persen) .....	III - 6
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 .....	III - 7
Gambar 3.4	Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023.....	III - 7
Gambar 3.5	Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023 .....	III - 8
Gambar 3.6	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023.....	III - 9
Gambar 3.7	Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2023.....	III - 9
Gambar 4.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	IV - 12
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 62



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023 (miliar rupiah) .....	II	-	31
Grafik	2.2	Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022.....	II	-	78
Grafik	3.1	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022 .....	III	-	10
Grafik	3.2	Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem .....	III	-	11
Grafik	3.3	Laju Inflasi Tahun 2019-2023 .....	III	-	13
Grafik	3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023 .....	III	-	14



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen resmi tahunan sebagai tahapan penyusunan RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 memuat rencana kerja perangkat daerah (PD) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah, indikator hasil program (*outcome*), penanggung jawab program, serta rincian kebutuhan dana/pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan azas koordinasi dengan berbagai pihak.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);



14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten



Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 Nomor 1).

### **1.3 Hubungan antar Dokumen**

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPД kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPД provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPД.

Keterkaitan RKPД dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Dan Keterkaitan RKPd Dengan**  
**Dokumen Perencanaan Lainnya**

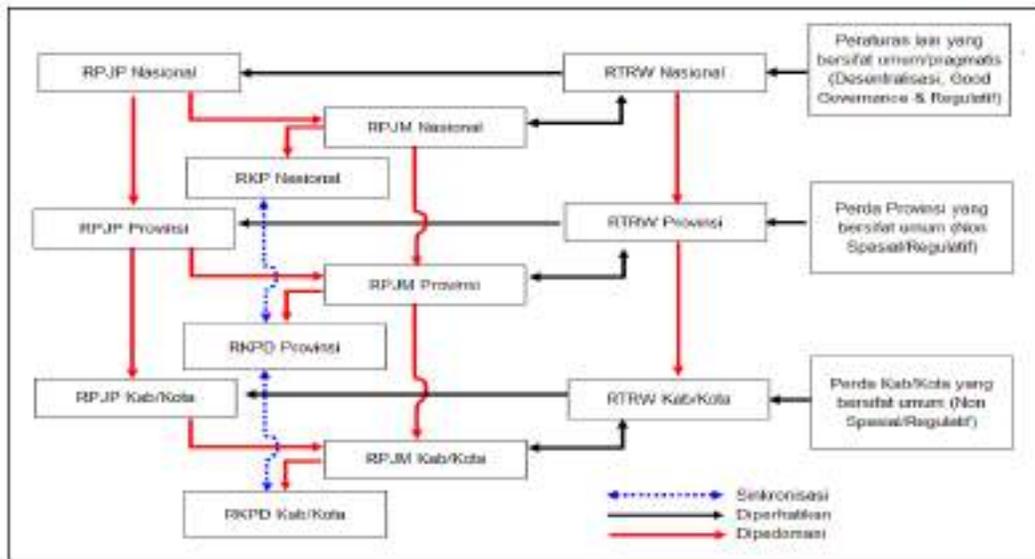


Rancangan Akhir RKPd 2026 dibahas pada forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan RKPd 2026. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPd disempurnakan menjadi RKPd berdasarkan Rancangan Akhir Renja PD dan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPd Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Kemudian Rancangan Akhir RKPd 2026 akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RKPd akan dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA-OPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPd Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPd Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.2 berikut ini.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota**



#### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penganggaran tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan Ranhir RKPD serta Maksud dan Tujuan.

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu.

#### **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan Tahun 2026.

#### **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan pada tiap bidang urusan wajib/pilihan pemerintahan Tahun 2026.

#### **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026.

#### **BAB VII. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Ranhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yang selanjutnya akan disempurnakan hingga menjadi RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman ataupun landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Ranhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 adalah:

1. Dokumen yang memuat arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 ke dalam rencana operasional pada Tahun 2026;
2. Sebagai tolok ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

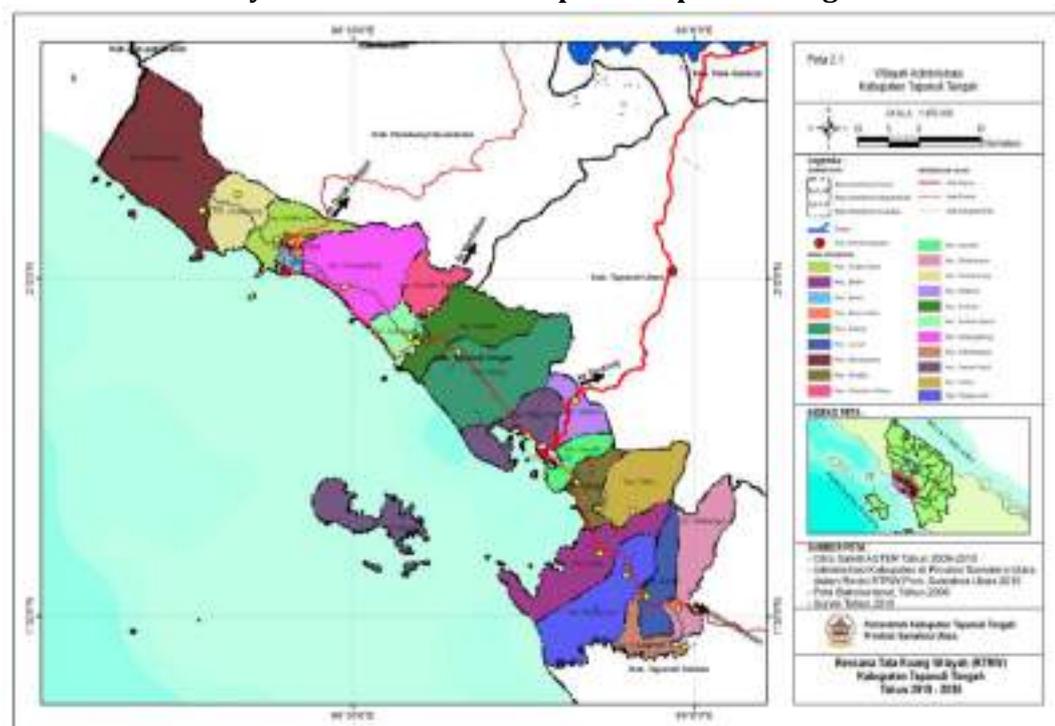
##### 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

###### a. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah pProvinsi Sumatera Utara, dimana salah satu daerah otonom kabupaten yang dibentuk menurut undang-undang tersebut adalah Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian selatan Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara) dan berlokasi di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 2.1**  
**Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah**



###### b. Letak dan Batas Administrasi Daerah

Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada posisi koordinat **1°11'00" - 2°22'0" LU** dan **98°07' - 98°12'BT**. Sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pulau Sumatera Utara dan sebagian lagi merupakan 31 (tiga puluh satu) pulau-pulau kecil, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Mursala dengan luas ± 8.000 Ha, memiliki panorama alam yang sangat indah meliputi air terjun yang langsung jatuh ke laut, terumbu karang dan hutan Pulau Mursala. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panjang garis pantai ± 200 km dan salah satu daerah maritim di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia.

### c. Luas Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibu kotanya Pandan mempunyai luas wilayah **6.194,98 km<sup>2</sup>** meliputi 2.194,98 km<sup>2</sup> luas daratan dan 4.000 km<sup>2</sup> luas laut.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km<sup>2</sup> (19,88%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km<sup>2</sup> (0,99%). Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	%
1.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2.	Badiri	2	7	129,49	5,90
3.	Sibabangun	1	6	286,64	12,97
4.	Lumut	1	5	105,98	4,83
5.	Sukabangun	-	6	49,37	2,25
6.	Pandan	20	2	34,31	1,56
7.	Tukka	5	4	150,93	6,87
8.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
9.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
10.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
11.	Kolang	2	12	436,29	19,88
12.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
13.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
14.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
15.	Barus	2	11	21,81	0,99
16.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
17.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
18.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
19.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
20.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>159</b>	<b>2.194,98</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

#### **d. Topografi dan Hidrologi**

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai  $\pm 200$  km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian di atas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **e. Geologi**



Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapan Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

#### **f. Hidrologi**

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

#### **g. Klimatologi**

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20°C dan suhu minimum mencapai 22,00°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40°C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

### **a. Wilayah Hutan Produksi**

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- 4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- 5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- 10) meningkatkan ekspor; atau
- 11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

### **b. Wilayah Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapan Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

### **c. Wilayah Pertanian tanaman pangan**

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah dilapangan dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

- 1) Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
- 2) Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat mengalih fungsikan lahannya.
- 3) Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
- 4) Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
- 2) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
- 3) Penentuan batas dan pemberian ijin Kawasan Pertanian Lahan
- 4) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun

#### **d. Wilayah Pertanian Hortikultura**

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan disemua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan.

Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 458.12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

#### **e. Wilayah Perkebunan**

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka,

Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesar 40.386 Ha

Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
- 2) Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
- 4) Penentuan batas dan pemberian ijin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

#### **f. Wilayah Perikanan**

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai arahan ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara

analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah.

Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan disini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena disamping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan

- 1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- 2) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- 3) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapian Nauli.
- 4) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi :

- a) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- b) Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
- c) Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;

- d) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya;
- e) Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 7) Meningkatkan ekspor; dan/atau
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **g. Wilayah Pertambangan**

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian

yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan bahan galian dan lokasinya
- 2) Kondisi dan Kebutuhan Daerah
- 3) Pangsa Pasar

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, diantaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perjanjian bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perijinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
- 2) kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
- 3) kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan;
- 4) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WPU) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Sukabangun;
- 3) Kecamatan Lumut;
- 4) Kecamatan Pinangsori;
- 5) Kecamatan Badiri;
- 6) Kecamatan Tukka;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Sitahuis;
- 9) Kecamatan Tapian Nauli;
- 10) Kecamatan Kolang;
- 11) Kecamatan Sorkam;
- 12) Kecamatan Sorkam Barat;
- 13) Kecamatan Sirandorung;
- 14) Kecamatan Barus Utara;
- 15) Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapian Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;
- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri;
- 17) Kecamatan Sibabangun dan

18) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

- 1) Kecamatan Badiri;
- 2) Kecamatan Kolang; dan
- 3) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori;
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapian Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Baru;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;
- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **h. Wilayah Industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah :

- 1) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional;
- 2) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional).

- 3) Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada :

- 1) Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- 2) Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
- 3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah :

- 1) Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
- 2) Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
- 3) Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri;
- 4) Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agro industri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada hinterlandnya. Dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- 2) industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapan Nauli;
- 3) industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;

- 2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

#### **i. Wilayah Pariwisata**

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam.

Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) Kawasan peruntukkan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.
- 3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- 4) Perusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- 5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

- 1) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aek nabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapanuli Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi

dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk;

- 2) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata adalah Makam Raja Sasi Hutagalung.

#### **j. Wilayah Permukiman**

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- 1) Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitasnya.
- 2) Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- 3) Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.
- 4) Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
- 5) Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktifitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan.

Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan disini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter

geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisa aspek fisik geologi dengan metode skoring.

**a. Kawasan Rawan Bencana Longsor**

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.2**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan lereng	1. Kemiringan 0 % - 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	2		10
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	3		15
	4. Kemiringan 40 %	5		5
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode : Qvt, Tmvak, Tmvp	3		12
	3. Kode : Tmba, Tlsb	5		20
	4. Kode : Mpisl, Puk	2		8
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama dalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan

rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,879
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	3.1876,48
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,90	-	6.323,81
Pinang Sori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4746,4
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>26.961,92</b>	<b>75.529,45</b>	<b>96.060,33</b>	<b>34658,41</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

#### **b. Kawasan Rawan Banjir**

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

**c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut**

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andamdewi.

**d. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

**1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabumi adalah : sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil skoring akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempabumi ( dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempabumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang dan rendah.

**Tabel 2.4**  
**Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan**  
**Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah**

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode : Qvlt, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode : Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan lereng	1. 0 % - 8 %	1	3	3
	2. 8 % - 25 %	2		6
	3. 25 % - 40 %	3		9
	4. > 40 %	4		12

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Data kegunaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan perkecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

**Tabel 2.5**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Barus	-	118,21	1.400,54	-	1.518,75
Barus Utara	-	146,75	926,93	-	1.073,67
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	-	8.248,88
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,48
Pandan	-	934,87	4.508,32	361,95	5.805,14
Pasaribu Tobing	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81
Pinang Sori	7,65	4.032,04	14.347,98	-	18.387,66
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,40
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	-	13.200,33
Sirandorung	-	633,46	8.081,39	906,26	9.621,11
Sitahuis	-	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Sorkam	-	1.111,56	1.3396,16	-	14.507,72
Sorkam Barat	-	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Sosorgadong	247,64	5.439,04	15.259,68	154,41	21.100,76
Sukabangun	-	679,68	3.459,50	449,93	4.589,115
Tapian Nauli	-	818,99	8.756,74	8.414,26	17.990,00
Tukka	504,71	4.848,29	6.379,81	695,61	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>1.655,59</b>	<b>41.187,13</b>	<b>167.907,89</b>	<b>22.459,51</b>	<b>233.210,10</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

## 2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis disepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi run up saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami**  
**Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan			Jumlah Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Barus	58,56	704,04	756,16	1.518,75
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Pinang Sori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Sirandorung	5.668,46	3.066,28	886,37	9.621,11
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
<b>Jumlah Total (Ha)</b>	<b>151.891,32</b>	<b>48.929,95</b>	<b>32.388,84</b>	<b>233.210,11</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi - sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

**Tabel 2.7**  
**Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>Kawasan Rawan Bencana</b>	<b>Tingkat Kerawanan</b>	<b>Pola Ruang</b>
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempabumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

*Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033*

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

### **3) Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan disepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

#### **2.1.1.4. Demografi**

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai data BPS Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 berjumlah 386.895 jiwa penduduk dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 394.910 jiwa.

#### **a. Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan

dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antar fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproduktive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration). Dengan telah berjalannya system registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Pinangsori	27.198	347,27
2	Badiri	29.318	226,41
3	Sibabangun	19.530	68,61
4	Lumut	13.613	128,45
5	Sukabangun	4.267	86,43
6	Pandan	65.371	1905,86
7	Tukka	15.745	104,32
8	Sarudik	24.530	946,37
9	Tapian Nauli	21.662	260,96
10	Sitahuis	6.355	125,79
11	Kolang	22.506	51,58
12	Sorkam	17.772	220,47
13	Sorkam Barat	19.117	428,82
14	Pasaribu Tobing	8.081	78,18
15	Barus	18.505	848,46
16	Sosor Gadong	15.740	109,97
17	Andam Dewi	17.344	141,68
18	Barus Utara	5.213	82,72
19	Manduamas	24.817	249,29
20	Sirandorung	18.226	207,77
<b>Jumlah</b>		<b>394.910</b>	<b>179,92</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

## b. Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Karakteristik penduduk menurut jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk**  
**Tahun 2021 - 2023**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk		
		2022	2023	2024
1	Pinangsori	101,53	101,71	101,92
2	Badiri	107,14	104,66	104,79
3	Sibabangun	100,98	101,27	101,55
4	Lumut	100,82	100,99	101,20
5	Sukabangun	103,01	102,29	102,04
6	Pandan	103,00	102,88	102,75
7	Tukka	101,13	100,21	100,34
8	Sarudik	97,47	104,52	104,55
9	Tapian Nauli	104,34	104,64	104,96
10	Sitahuis	99,47	99,36	99,22
11	Kolang	102,36	103,34	103,71
12	Sorkam	96,99	96,48	95,99
13	Sorkam Barat	101,35	101,87	102,38
14	Pasaribu Tobing	98,12	98,08	98,02
15	Barus	105,17	105,56	105,93
16	Sosor Gadong	98,46	98,41	98,36
17	Andam Dewi	98,38	98,53	98,67
18	Barus Utara	95,00	94,89	94,73
19	Manduamas	99,99	99,98	99,94
20	Sirandorung	101,91	99,96	99,89
<b>Jumlah</b>		<b>101,48</b>	<b>101,71</b>	<b>101,79</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

## c. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Komposisi

penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-39 tahun.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2024**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
0-4	20.929	20.016	40.945
5-9	15.677	15.099	30.776
10-14	17.860	17.036	34.896
15-19	18.906	18.106	37.012
20-24	19.448	18.351	37.799
25-29	18.336	17.232	35.568
30-34	17.084	15.871	32.955
35-39	15.813	14.714	30.527
40-44	13.045	11.975	25.020
45-49	11.223	10.506	21.729
50-54	9.307	9.196	18.503
55-59	7.333	7.941	15.274
60-64	5.698	6.691	12.389
65-69	4.067	5.304	9.371
70-74	2.558	3.788	6.346
75+	1.919	3.881	5.800
<b>Jumlah</b>	<b>199.203</b>	<b>195.707</b>	<b>394.910</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

**d. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

Secara umum lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa sebesar 103.476 jiwa, diikuti sektor pertanian sebesar 73.436 jiwa. Secara detail dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu**

**yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Usaha dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024**

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	45.030	28.456	73.486
2.	Industri	18.067	7.764	25.831
3.	Jasa	49.820	53.656	103.476
<b>Tapanuli Tengah</b>		<b>112.917</b>	<b>89.876</b>	<b>202.793</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**e. Penduduk Menurut Pendidikan**

Persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2024 sudah sangat jauh berkurang yaitu sebesar 64,79 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 73,81%.

**Tabel 2.12**  
**Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan  
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dan 2024**

No.	Status Pendidikan	2023	2024
1.	Tidak / Belum pernah sekolah	<b>0,42</b>	<b>3,67</b>
2.	Masih Sekolah	<b>25,77</b>	<b>31,55</b>
	- SD/ MI/ Sederajat	7,98	16,35
	- SMP/ MTs/ Sederajat	8,02	6,27
	- SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	6,61	6,85
	- Diploma/ Sarjana	3,16	2,08
3.	Tidak Bersekolah lagi	<b>73,81</b>	<b>64,79</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**f. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 49.210 jiwa atau sebesar 11,80%.

**Tabel 2.13**

**Jumlah Penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 – 2024**

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah		
	2022	2023	2024
	- Jumlah total (ribu jiwa)	47,07	47,09
- Persentase	11,71	11,50	11,80
- Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bln)	450.940	489.760	527.227

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choice*). Dalam konsep tersebut penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*), bukan cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (*Human capital formation*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

**2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah), 2020-2024.

**Tabel 2.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2020-2024**

No	Kategori	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.682,30	4.906,09	5.440,65	5.911,56	6.427,98
2	Pertambangan dan Penggalian	26,20	27,62	29,90	32,42	33,17
3	Industri Pengolahan	1.133,10	1.232,82	1.350,04	1.421,54	1.539,45
4	Pengadaan listrik dan gas	57,53	59,82	64,88	66,79	70,10
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	12,56	12,77	13,89	14,59	16,13

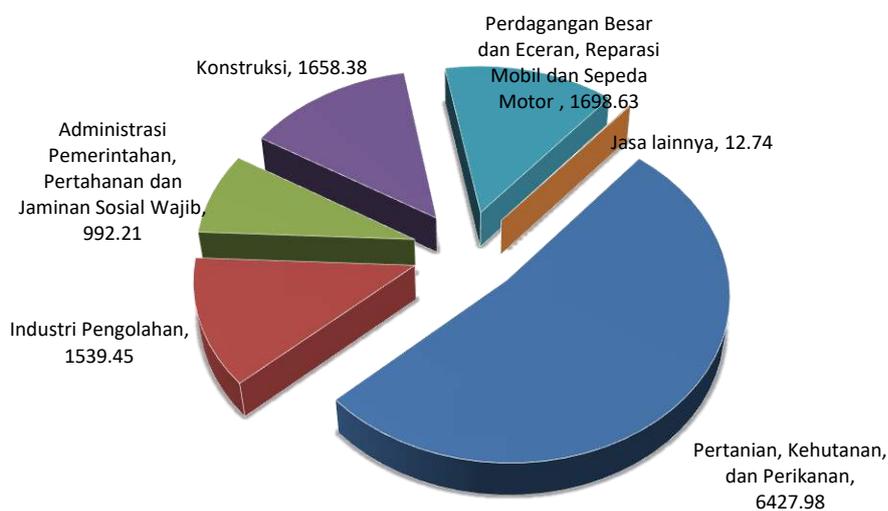
6	Konstruksi	1.170,78	1.246,27	1.361,31	1.515,55	1.658,38
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	1.246,49	1.327,07	1.462,36	1.584,87	1.698,63
8	Transportasi dan Pergudangan	259,80	231,17	280,50	346,06	363,17
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	138,99	140,84	154,21	166,99	181,37
10	Informasi dan komunikasi	65,35	70,94	77,26	81,67	85,54
11	Jasa keuangan dan asuransi	98,92	108,86	115,48	121,03	123,47
12	Real Estate	208,59	215,09	230,82	245,46	253,89
13	Jasa Perusahaan	33,08	34,68	38,66	43,04	44,97
14	Adm. Pemerintahan, pertanahan dan Jamsos wajib	861,53	856,01	856,28	909,66	992,21
15	Jasa Pendidikan	99,16	103,83	110,17	117,19	125,19
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Soaial	35,16	35,22	38,26	41,70	44,89
17	Jasa Lainnya	9,30	9,63	10,62	11,66	12,74
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>10.138,83</b>	<b>10.618,75</b>	<b>11.635,30</b>	<b>12.631,77</b>	<b>13.671,28</b>

Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

**Grafik. 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (miliar rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah), 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>
2019	26.119
2020	27.868
2021	28.754
2022	31.049
2023*	32.649
2024**	34.618

Catatan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut :

#### a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa baca tulis yang diupayakan tetap ditingkatkan agar dapat dipertahankan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.16**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf**  
**Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023 dan 2024**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Capaian</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>
15-24	100,00	100,00
15-59	99,51	99,60
15+	98,49	98,24
60+	92,27	89,76

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

#### b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah suatu ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup yang layak.

**Tabel 2.17**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Dan Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024**

<b>Komponen</b>	<b>Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah</b>			<b>Capaian Provinsi Sumatera Utara</b>		
	<b>Tengah</b>			<b>Utara</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

Usia Harapan Hidup (tahun)	71,47	71,76	71,96	73,39	73,67	73,90
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,49	13,50	13,31	13,48	13,49
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,86	8,87	8,92	9,71	9,82	9,93
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	10.495	10.690	1.128	10.848	11.049	1.460
<b>IPM</b>	<b>72,18</b>	<b>72,77</b>	<b>73,34</b>	<b>74,51</b>	<b>75,13</b>	<b>75,76</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan IPM dari tahun 2022 s/d 2024 yaitu sebesar 73,34 namun masih berada dibawah pencapaian Provinsi Sumatera Utara. Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih harus berusaha dalam meningkatkan komponen indeks pembangunan manusia (IPM) dalam rangka pencapaian standar hidup yang layak.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup banyak, yang terbagi dalam benda bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah bergerak antara lain ulos, gondang batak, dan tenunan khas melayu. Sedangkan benda bersejarah yang tidak bergerak, yaitu makam pembawa ajaran Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik pertama kali di Pantai Barat Sumatera, Batu Lobang dan Monumen – monumen perjuangan yang ada di Kecamatan Sitahuis dan Tapan Nauli serta Situs Makam Mahligai dan Situs Makam Papan Tinggi sebagai pembawa ajaran Islam di Indonesia, Situs dimaksud berada di Kecamatan Barus Utara yang sangat penting untuk dibangun fasilitas pendukung sebagai tempat wisata religi.

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat

provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olah raga.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 2.1.3.1.1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk meningkatkan capaian kinerja untuk urusan Pendidikan termasuk angka partisipasi, akreditasi sekolah, hingga pemberian beasiswa untuk siswa yang kurang mampu namun berprestasi. Berikut disajikan table capaian kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2020 s/d 2023.

**Tabel 2.18**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2023**

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Murid/Siswa</b>					
	- TK/PAUD	8.652	7.492	3.366	6.921	8.495
	- SD/MI	45.121	43.938	45.168	37.555	44.108
	- SMP/MTs	21.979	20.154	22.663	17.853	23.840
<b>2</b>	<b>Guru</b>					
	- TK/PAUD	487	417	955	647	675
	- SD/MI	3.543	3.380	3.339	3.813	3.386
	- SMP/MTs	2.319	2.226	1.573	1.824	1.436
<b>3</b>	<b>Sekolah</b>					
	- TK/PAUD	249	246	304	228	228
	- SD/MI	351	351	353	352	352
	- SMP/MTs	103	104	106	108	108
<b>4</b>	<b>Angka Partisipasi</b>					
	- TK / PAUD					
	* APK	66,68	68,83	54,75	54,04	63,56
	- SD/MI					
	* APK	99,58	99,69	99,77	99,88	99,98
	* APM	96,51	97,31	98,73	99,13	99,58
	* Angka Putus Sekolah	0,05	0,09	0,10	0,01	0,07
	* Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	12,74	12,83	15,53	11,76	13,02
	- SMP/MTs					
	* APK	95,21	96,71	98,45	98,68	99,10
	* APM	90,20	91,63	91,82	93,87	95,10
	* Angka Putus Sekolah	0,39	0,51	0,17	0,01	0,15
	* Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	9,58	11,13	14,40	13,28	16,60
<b>5</b>	Penduduk Berusia >15 Tahun Melek Huruf (%)	99,90	99,93	99,95	99,98	99,98
<b>6</b>	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	91,47	93,25	95,37	97,33	99,21

7	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	97,87	97,87	98,24	98,45	99,63
8	Guru Pendidikan Dasar Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	85,38	88,34	94,22	96,86	97,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat penggerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2024 sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Hingga tahun 2024 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 89 unit. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 17 unit.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Jumlah Poskesdes di kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir karena bangunan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan ketidakaktifan petugas dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2024 jumlah Poskesdes sebanyak 42 unit.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas Kesehatan dan aparat desa/ kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/ medis. Pada tahun 2024, jumlah posyandu di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 385 unit.

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit. Jumlah perawat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 400 orang. Jumlah bidan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 771 orang. Jumlah dokter umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 65 orang. Jumlah dokter gigi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 22 orang.

**Tabel 2.19**  
**Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya**  
**Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 - 2025**

No	Tahun	Puskesmas	PUSTU	BPU/KLINIK	Poskesdes	Posyandu
1	2020	25	91	15	42	385
2	2021	25	89	17	46	383
3	2022	25	89	16	42	385
4	2023	25	89	17	42	385
5	2024	25	89	17	42	385

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya dalam penyediaan tenaga kesehatan.

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Doter Gigi, Dokter Spesialis**  
**Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2024**

No	Tahun	Perawat	Bidan	Dokter Umum PNS/PTT	Dokter Gigi PNS/PTT	Dokter Spesialis
1	2019	416	773	47	19	-
2	2020	438	788	47	20	-
3	2021	413	785	57	18	-
4	2022	412	734	58	19	-
5	2023	400	771	65	22	-
6	2024	449	737	79	25	27

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

Peningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat diarahkan kepada Penurunan Stunting merupakan salah satu Proyek strategis Nasional sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditunjuk menjadi salah satu dari Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting pada tahun 2020 hingga sekarang sesuai dengan Strategi Nasional Anak Kerdil Tahun 2018-2024.

Kondisi stunting merupakan sebuah sinyal bahwa balita tersebut pernah atau sedang dalam kondisi kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat dan berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwa Keluarga Beresiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting.

Sebagai salah satu upaya dalam bidang pembangunan mausia, pelaksanaan percepatan stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah didukung dengan regulasi yang telah diterbitkan, antara lain :

1. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dan Kelurahan Dalam Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 633/DPPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Sekretariat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 - 2024;
4. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1431/BPTT/2024 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Secara umum, indikator penurunan stunting diukur dengan Prevalensi Stunting dan Keluarga Resiko Stunting. Prevalensi stunting adalah Perbandingan antara jumlah kasus balita stunting dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur pada rentang waktu yang tertentu. Terdapat 2 metode pengukuran prevalensi stunting, yaitu melalui data yang diolah dari aplikasi elektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan laporan Survey Standar Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

**Tabel 2.21**  
**Data ePPGBM Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Periode data e PPGBM yang digunakan	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Nop 2024
2	Jumlah Balita diukur (Orang)	24.357	22.431	20.579	21.102	15.893
3	Cakupan Jumlah Balita yang diukur	88,42%	88,08%	85.50%	88,61%	69,93
4	Jumlah Kasus di Kabupaten (Orang)	1.726	1.521	487	267	145
5	Prevalensi Stunting Kabupaten	7,09	6,78	2,37	1,27	0,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Dalam penurunan stunting terintegrasi, upaya dapat dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif. Untuk mendorong tercapainya target RPJMN Tahun 2025 - 2029, bahwa pada tahun 2026 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14,2% dinilai perlu untuk melakukan penanganan secara fokus.

### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Jalan dan Jembatan

Keluaran (*output*) dari kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan adalah Jalan Hotmix 1.050 m', Rabat 585,30 m', Pembangunan Jembatan 1 Unit, Rehab. Rambu 1 Unit, Plat Beton 4 Unit, Drainase 22 m', Dek 43 m' dan Galian Tanah 1.000 m. Dan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan menangani Hotmix 390 m', Sirtu 72 m', Base A 25,57 m', Tanah Timbun 15 m', Rehab Jembatan beton 2 Unit (26 m'), Rehab. Jembatan Lantai Besi 1 Unit (13 m'), Rehab. Jembatan Lantai Kayu 7 Unit (186 m'), Rehab. Rambu 1 Unit (71 m'), Plat Beton 1 unit, Dek 66,70 m' dan Galian Saluran 30 m.

Hal ini memperlihatkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga keadaan ini dapat membuat

kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa mendatang.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023, untuk Jalan Nasional 181,89 km, Jalan Provinsi 56,50 km dan Jalan Kabupaten 722,57 km. Sedangkan untuk kondisi jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 yang Baik 306,08 km, Sedang 125,43 km, Rusak 73,08 km dan Rusak Berat 217,9 km.

Sedangkan untuk Total Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 sebanyak 249 jembatan yang tersebar di 20 Kecamatan.

#### **b. Kondisi Daerah Irigasi**

Keluaran (output) dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari beberapa pekerjaan yang berupa Bangunan Bagi 16 Unit, Saluran Pasangan (beton) 571 m', Rehab. Saluran Pasangan batu 159 m', Saluran pasangan Batu 18 m', Pintu Air 4 Unit. Pada Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai terdiri dari Rehab. Saluran Pasangan 523 m' dan Talang 34 m'.

Irigasi yang menjadi kewenang Provinsi yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah ada 3 Daerah Irigasi Mombang boru seluas 320 ha, Daerah Irigasi Badiri Lopian seluas 1.283 ha dan Daerah Irigasi Pandurungan/Sitandiangan seluas 1.769 ha.

**Tabel 2.22**  
**Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi**  
**Serta Luas Tata Ruang Tahun 2020-2024**

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	Perkembangan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Panjang Jalan Kabupaten		722,57	722,57	722,57	722,57	
	- Diaspal	Km	521,05	521,05	521,05	521,05	
	- Kerikil	Km	62,52	62,52	62,52	62,52	
	- Tanah	Km	139	139	139	139	
	b. Panjang Jembatan Kabupaten						
	- Jembatan Rangka Baja	M	335	335	335	335	
	- Jembatan Beton	M	2.022	2.022	2.022	2.022	

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- Jembatan Kayu	M	265	265	265	265	
	- Gelagar Kayu	M	15	15	15	15	
	- Gelagar Besi	M	247	247	247	247	
	- Jembatan Rambin	M	662,2	662,2	662,2	662,2	
<b>2.</b>	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Jalan Kabupaten						
	- Baik	Km	363,27	391,20	401,90	306,08	
	- Sedang	Km	51,43	51,43	56,43	125,43	
	- Rusak	Km	182,91	154,98	144,98	73,08	
	- Rusak Berat	Km	124,96	124,96	119,26	217,98	
	b. Jembatan Kabupaten						
	- Baik	M	2.272,4 5	2.272,4 5	2.272,4 5	2.272,4 5	
	- Sedang	M	246,8	246,8	246,8	246,8	
	- Rusak	M	382,56	382,56	382,56	382,56	
<b>3</b>	Jenis Bendung						
	a. Bendung Teknis/ Permanen	Bua h	59	59	59	59	
	b. Bendung Semi Permanen	Bua h	2	2	2	2	
	c. Bendung Sederhana	Bua h	5	5	5	5	
<b>4</b>	Kondisi Bendung Permanen						
	- Baik	Bua h	30	31	31	31	
	- Sedang	Bua h	23	22	22	22	
	- Rusak	Bua h	6	6	6	6	
<b>5</b>	Kondisi Bendung Semi Permanen						
	- Baik	Bua h	1	1	1	1	

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- Sedang	Bua h	-	-	-	-	
	- Rusak	Bua h	1	1	1	1	
<b>6</b>	Kondisi Saluran Irigasi Primer						
	- Baik	M	28.154, 13	30.803, 13	32.961, 63	34.296, 63	
	- Sedang	M	13.950, 44	11.301, 44	9.142,9 4	8.949,9 4	
	- Rusak	M	-	-	-	-	
<b>5</b>	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder						
	- Baik	M	74.697, 32	77.065, 32	78.584, 12	79.829, 12	
	- Sedang	M	24.842, 47	22.474, 47	20.955, 67	19.710, 67	
	- Rusak	M	3.201,2 1	3.201,2 1	3.201,2 1	3.201,2 1	
<b>6</b>	Kondisi Saluran Irigasi Tersier						
	- Baik	M	26.715, 73	26.715, 73	26.715, 73	26.715, 73	
	- Sedang	M	9.207,8 1	9.207,8 1	9.207,8 1	9.207,8 1	
	- Rusak	M	6.577,3 1	6.577,3 1	6.577,3 1	6.577,3 1	
<b>7</b>	Luas Irigasi Kabupaten	Ha	12.853	12.853	12.853	12.853	
	- Baik	Ha	8.673,2 0	9.040,8 0	9.323,5 6	9.419,6 9	
	- Baik	%	67,48	70,34	72,54	73,29	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

### c. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus telah menyesuaikan RTRW terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033 adalah untuk mewujudkan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di kawasan barat Sumatera Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

1. Untuk mencapai pemanfaatan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dilakukan strategi sebagai berikut:
  - a. Melestarikan areal pertanian lahan basah yang sudah ada melalui upaya intensifikasi dengan di dukung jaringan irigasi yang mantap.
  - b. Mempertahankan kawasan hutan dan areal lindung lainnya dalam rangka penyangga sumber daya air, penyaring polusi udara, keanekaragaman hayati dan penangkal bencana untuk daerah bawahannya.
  - c. Menetapkan jenis komoditi pertanian dan perkebunan sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan melalui zonasi komunitas.
  - d. Pembangunan mini hidro pada aliran sungai yang berpotensi dan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angin.
  - e. Menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan kawasan penambangan galian C.
2. Untuk melakukan pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
  - a. Menetapkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi kegiatan ekonomi masyarakat
  - b. Mempercepat tersusunnya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan.
  - c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat.
3. Untuk melakukan penyediaan infrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
  - a. Jaringan Transportasi
    - 1) Menyediakan jaringan transportasi darat yang menunjang pengembangan daerah dengan:
      - a) Merencanakan jaringan jalan baru, meningkatkan kapasitas pelayanan jalan yang ada dan menetapkan terminal angkutan penumpang dan barang serta daerah tempat istirahat (*rest area*) pada jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

- b) Merencanakan jalur kereta api yang baru, meningkatkan kapasitas pelayanan kereta yang ada, pembangunan dan peningkatkan stasiun angkutan penumpang dan barang.
  - 2) Mengembangkan transportasi udara dengan mengembangkan dan memelihara bandara perintis di Kecamatan Pinangsori.
  - 3) Mengembangkan jaringan air baku untuk kegiatan domestik, industri dan irigasi untuk pertanian dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.
  - 4) Mengembangkan jaringan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik mini hidro, energi angin, energi bio massa dan sumber energi listrik lainnya yang berkapasitas besar serta mengembangkan sistem jaringan listrik yang efektif melalui pengembangan jaringan kluster dan interkoneksi.
  - 5) Mengembangkan jaringan telekomunikasi guna mempercepat arus informasi yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - 6) Mempersiapkan jaringan gas sebagai sumber energi baru dalam rangka menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan, antara lain:
- a. Mengembangkan stasiun agropolitan guna mendukung daerah pegunungan
  - b. Mengembangkan kawasan pariwisata guna mendukung pembangunan di daerah.
  - c. Mengembangkan kawasan industri Kecamatan Tapan Nauli, Sarudik, dan Barus guna mendukung pembangunan agroindustri
  - d. Mengembangkan Ibukota Kabupaten di Pandan sebagai pusat pemerintahan.
  - e. Menetapkan PKL, PPK, dan PPL.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten juga memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 disebutkan bahwa rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Rencana Struktur

Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana.

Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana sistem jaringan yang dimaksud terdiri dari rencana sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya, sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya seperti sistem jaringan persampahan, penyediaan air minum, drainase, dan air limbah.

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- c. Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

#### **1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, Perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

- a. Barus
- b. Pandan

Besaran Potensi Lokasi PKL di dua daerah sangat baik, mudah dan menguntungkan di karenakan Pandan merupakan Pusat Ibukota Kabupaten dan Kecamatan Barus banyak di keliingi oleh Destinasi wisata dan Transportasi masih mudah terjangkau.

#### **2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesibilitas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan

pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

#### 2.1.3.1.3. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah Layak Huni Secara Stimultan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu, dimana pembangunan rumah layak huni yang terbangun pada Tahun 2023 sebanyak 70 unit dari dana DAU, 50 unit dari dana APBD Provinsi dengan total sebanyak 120 unit rumah. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel dibawah ini. Untuk data pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni) sejak tahun 2023-2026 dapat disajikan data berikut.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Pembangunan Baru/ Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					
	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	Tahun	Satuan	Target RPD	Realisasi	Keterangan
1.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2023	Unit	30	70	Sumber dana DAU
	Peningkatan RTLH		Unit	-	50	Sumber dana APBD Provinsi
2.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2024	Unit	30	27	Sumber dana DAU
					119	CSR
3.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2025	Unit	30	-	Sumber dana DAU
4.	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	2026	Unit	30	-	Sumber dana DAU
Total Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH pada Tahun 2023 - 2026 (Target RPD)			Unit	120	266	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Tengah, 2025

#### 2.1.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat wewenang dalam memelihara Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta Pemadaman Kebakaran tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan beberapa tindakan dengan menugaskan pesonil yang dimiliki. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan Kantrantibmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah berupa :(1) pelaksanaan operasi rutin terkait pelanggaran peraturan daerah, (2) patroli bersifat priodik terkait kondusifitas ketentraman masarakat dan ketertiban umum serta (3) pembinaan dan peningkatan anggota Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta (4) Tugas Pemadaman kebakaran.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Kantrantibmas dan Pencegahan**  
**Tindak Kriminal Tahun 2019 - 2023**

NO.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP + Damkar)	Orang	347	365	380	364	345
2.	Jumlah Linmas	Orang	2.076	2.076	2.076	2.660	

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Penertiban di Kabupaten**  
**Tapanuli Tengah Tahun 2022 - 2024**

No.	Operasi Penertiban	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%
1.	Peningkatan Disiplin PNS	100	100	100	100	100	100	100	80	80
2.	Penertiban IMB	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Operasional Kasih Sayang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Pengamanan Objek Vital	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penertiban PSK dan Sarang Prostitusi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	75	75

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**Tabel 2.26**  
**Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan**  
**Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2023**

NO.	NAMA OPERASI	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
-----	--------------	--------	--------	------------

1.	Operasi Penutupan sarang Prostitusi	0	Tempat	-
2.	Operasi Pedagang Kaki Lima	6	Kegiatan	Operasi Penertiban Pedagang kaki lima (per kegiatan/tahun ) berdasarkan aduan masyarakat
3.	Operasi Wanita Rawan Sosial	24	Orang	Operasi penertiban Wanita Rawan Sosial
4.	Operasi Hewan Berkaki Empat	0	Ekor	-
5.	Operasi Kasih Sayang	23	Orang (Anak Usia Sekolah)	Penertiban Anak Usia Sekolah Pada Jam Belajar

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

#### b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA). Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Dengan kondisi geografis seperti ini Kabupaten Tapanuli Tengah juga rentan akan terjadinya bencana. Berikut disampaikan rekapitulasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2022, yaitu:

**Tabel 2.27**  
**Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2024**

No.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
<b>A. BENCANA BANJIR</b>				
1.	07 Maret 2024	Desa Aek Silaga-laga Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Pada jam 14.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi di wilayah tukka yang mengakibatkan air meluap. 2. TIM BPBD melakukan evakuasi sekaligus cek lapangan.
2.	08 Maret 2024	Desa Sigambo-gambo Kecamatan Barus	Tidak ada	1. Pada jam 17.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi di wilayah barus yang mengakibatkan banjir di desa sigambo-gambo. 2. TIM BPBD melakukan evakuasi sekaligus pembersihan pasca banjir
3.	07 s/d 08 Maret 2024	Lingkungan II Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Pada hari Kamis tanggal 7 maret 24 pukul 16.00 curah hujan turun dengan intensitas sangat tinggi sehingga sungai kolang mulai meluap, pada pukul 20.00 air sudah menggenangi rumah warga. 2. TIM BPBD melakukan evakuasi sekaligus cek lapangan pada hari jum'at tanggal 8 maret 24 pukul 01.00 dini hari air sudah mulai surut dan warga melakukan pembersihan mandiri pasca

				banjir.
4.	07 s/d 08 Maret 2024	Jalan Tigoran Lingk. IV Lorong pahlawan, Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada hari kamis tanggal 7 maret 24 pukul 16.00 curah hujan turun dengan intensitas sangat tinggi sehingga sungai kolang mulai meluap, pada pukul 20.00 air sudah menggenangi jalan aspal sehingga kendaraan tidak dapat melintas, pada pukul 22.00 telah terjadi 1 unit kendaraan roda 4 terseret arus banjir sepanjang 40 m sehingga kendaraan tersebut masuk kedalam parit besar.</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi sekaligus cek lapangan pada hari jum'at tanggal 8 maret 24 pukul 09.00 air sudah mulai surut dan kendaraan sudah dapat melintas, tim BPBD beserta warga membantu melakukan evakuasi kendaraan yang terseret arus banjir, pukul 13.00 akhirnya kendaraan dapat di evakuasi dari parit besar dan langsung dibawa ke bengkel.</li> </ol>
5.	23 Maret 2024	Lingkungsn Sibarung-barung Kecamatan Tukka	Tidak ada	Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi sehingga air di sungai aek silaga-laga meluap mengakibatkan banjir.
6.	16 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Gunung Kelambu</li> <li>2. Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri</li> </ol>	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 18.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah badiri yang mengakibatkan air sungai meluap dan ratusan rumah terdampak banjir tersebut.</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi dan pada jam 20.00 air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir</li> </ol>
7.	16 April 2024	Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 18.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah Tukka yang mengakibatkan air sungai meluap dan ratusan rumah terdampak banjir tersebut.</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi dan pada jam 20.00 air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir</li> </ol>
8.	16 April 2024	Kelurahan Albion Prancis Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 17.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah Pinangsori yang mengakibatkan air sungai meluap dan ratusan rumah terdampak banjir tersebut.</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi dan pada jam 20.00 air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir.</li> </ol>
9.	03 Mei 2024	Desa Gunung Kelambu Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 22.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah badiri yang mengakibatkan ratusan rumah terdampak banjir tersebut dan tinggi air sepinggang orang dewasa</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi pada saat air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir.</li> </ol>
10.	11 Juni 2024	Desa Tapian Nauli IV Kecamatan Tapian Nauli	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 22.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah badiri yang mengakibatkan ratusan rumah terdampak banjir tersebut dan tinggi air sepinggang orang dewasa</li> <li>2. TIM BPBD melakukan evakuasi pada saat air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir.</li> </ol>
11.	17 Juni 2024	Lingkungan II Lumut Kecamatan Lumut	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 22.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah badiri yang mengakibatkan ratusan rumah terdampak banjir tersebut dan tinggi air sepinggang orang dewasa</li> </ol>

				2. TIM BPBD melakukan evakuasi pada saat air sungai sudah surut dan tim membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak banjir.
12.	05 Oktober 2024	Dusun I, Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	1. Pada jam 06.50 telah turun hujan dengan intensitas tinggi, dan pada pukul 07.30 telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan jembatan di salah satu desa muara sibuntuon menuju desa sibiobio amblas sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat. 2. TIM BPBD bersama Aparat Desa dan Masyarakat Setempat melakukan pembuatan jembatan darurat.
13.	17 November 2024	Kel. Pasir Bidang Kel. Sarudik Kel. Pondok Bantu Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Pada Jam 01.00 wib telah turun hujan disertai dengan angin kencang disertai air laut naik pasang sehingga mengakibatkan banjir di wilayah sarudik. 2. TIM BPBD, TNI/POLRI beserta Aparat Desa dan masyarakat setempat melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak bencana ke tempat yang lebih baik.
14.	17 November 2024	Kel. Pasar Baru Perumahan Pandan Asri Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Pada Jam 01.00 wib telah turun hujan disertai dengan angin kencang sehingga air sungai meluap, dan menurut pengakuan warga pukul 05.00 wib air sungai yang meluap sudah memasuki rumah warga. 2. TIM BPBD, TNI/POLRI beserta Aparat Desa dan masyarakat setempat melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak bencana ke tempat yang lebih baik.

## B. BENCANA LONGSOR

1.	04 Februari 2024	Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka	Tidak ada	Telah terjadi bencana longsor yang mengakibatkan tertutupnya akses jalan.
2.	04 Februari 2024	Desa Sibiobio Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	Pada jam 02.30 WIB (Dinihari) tanggal 03 Februari 2024 telah terjadi bencana longsor yang mengakibatkan tertutupnya akses jalan.
3.	08 Maret 2024	Kelurahan Pargarutan Kecamatan Sorkam Desa Sampang Maruhur Kecamatan Sirandorung	Tidak ada	1. Pada jam 20.00 curah hujan dengan intensitas sangat tinggi sehingga mengakibatkan longsor. 2. TIM BPBD, Camat Sorkam, serta jajaran TNI, Polisi, Satpol PP serta Masyarakat setempat melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak longsor ketempat yang lebih aman.
4.	08 Maret 2024	Desa Nauli Kecamatan Sorkam	Tidak ada	Pada jam 21.00 curah hujan dengan intensitas sangat tinggi sehingga mengakibatkan longsor.
5.	23 Maret 2024	Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka	Tidak ada	Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi sehingga mengakibatkan longsor.
6.	16 April 2024	Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Pada jam 16.00 wib curah hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi diwilayah Tukka yang mengakibatkan air sungai meluap, selain itu air sungai juga membawa beberapa material pohon tumbang dari hulu sungai dan tanah longsor yang mengakibatkan mengenai 2 (dua) unit rumah warga sehingga mengalami rusak ringan. 2. TIM BPBD melakukan evakuasi kepada warga yang terkena dampak longsor.
7.	18 April 2024	Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor di desa manduamas lama sehingga membuat jalan desa terkikis. 2. TIM BPBD melakukan koordiansi dengan aparat desa setempat ( Lurah ).

8.	16 Agustus 2024	Kelurahan Sibuluan Nalambok, Lingkungan III Kecamatan Sarudik	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi bencana longsor yang menimpa rumah warga pada tanggal 15 Agustus 2024. terjadinya longsor mengenai 3 unit rumah dimana 2 tidak berpenghuni dan 1 berpenghuni (An. R.Sipahutar).</p> <p>2. TIM BPBD, Damkar, TNI dan Polisi beserta Aparat Desa Setempat melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak ketempat yang lebih layak.</p>
9.	22 November 2024	Kel. Sarudik Kecamatan Sarudik	Tidak ada	<p>1. Pada Jam 15.30 wib Kamis sore tanggal 21:11:2024, telah turun hujan disertai dengan angin kencang disertai air laut naik pasang sehingga mengakibatkan dinding tembok pembatas sungai milik PT. ASL longsor dan jatuh ke sungai sarudik sehingga menghambat jalur air sungai.</p> <p>2. TIM BPBD, TNI/POLRI beserta Aparat Desa dan masyarakat memberikan himbauan kepada masyarakat sekitaran sungai agar tidak mendekati dinding pembatas sungai.</p>

### C. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1.	06 Februari 2024	Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga membakar lahan kering yang ada di daerah tersebut.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
2.	01 Maret 2024	Desa Stardas Dusun 4 Kecamatan Badiri	Tidak ada	<p>1. Membakar lahan lama untuk membuka lahan baru. Lahan yang terbakar seluas +/- 1 Ha, Pemilik An. Kaheri Mendrofa Umur 36 Thn.</p> <p>2. TIM BPBD meninjau ke lokasi TKP bersama Bapak Kapolsek Pinangsori dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan lama untuk membuka lahan baru, karena akan dapat hukum pidana penjara 3 s/d 10 Thn dan Denda 300 Juta.</p>
3.	29 Mei 2024	Desa Gunung Dusun 4 Kelambu Kecamatan Badiri	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga membakar lahan kering yang ada di daerah tersebut, lahan yang terbakar seluas +/- 2 Ha, pemilik an. Timan Umur 68 Tahun.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
4.	27 Juni 2024	Desa Sitardas Dusun III Kecamatan Badiri	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga membakar lahan kering yang ada di daerah tersebut, lahan yang terbakar seluas +/- 2 Ha, pemilik an. Mareti Ndaha.</p> <p>2. TIM BPBD meninjau lokasi untuk memastikan api di TKP sudah padam.</p>
5.	13 Juli 2024	Jalan Rambah-Poriaha Kecamatan Tapian Nauli	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga membakar lahan kering yang ada di daerah tersebut, lahan yang terbakar seluas +/- 5 Ha, pemilik an. Tutak Hutagalung.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
6.	16 Juli 2024	Jalan Sibuluan II Kel. Sibuluan Nalambok Kecamatan	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga membakar lahan kering yang ada di daerah tersebut, lahan</p>

		Sarudik		<p>yang terbakar seluas +/- 2,5 Ha, pemilik an. Sorta Lumban Batu, Umur 41 Tahun.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
7.	21 Juli 2024	Kelurahan Sarudik, lingkungan III Kecamatan Sarudik	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan survei lapangan dan ketika di cek kelokasi ternyata api sudah padam.</p>
8.	22 Oktober 2024	Kelurahan Sibuluan Nalambok Lingkungan Sibuni-buni Kecamatan Sarudik	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut. Lahan yang terbakar diperhitungkan sekitar +/- 3 Ha dan pemilik An. Bapak Anita Siregar.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
9.	23 Oktober 2024	Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut. Lahan yang terbakar diperhitungkan sekitar +/- 1 Ha dan pemilik An. Bapak Syahrul Harahap.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
10.	27 Oktober 2024	Kelurahan Sibabangun Lingkungan 6 Kecamatan Sibabangun		<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
11.	06 November 2024	Desa Penanggahan Kecamatan Barus Utara		<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>
12.	10 November 2024	Desa Gunung Kelambu Dusun IV Kecamatan Badiri		<p>1. Telah terjadi kebakaran lahan diakibatkan panasnya/teriknya matahari sehingga mebakar lahan kering yang ada di daerah tersebut. Lahan yang terbakar diperhitungkan sekitar +/- 5 Ha dan pemilik An. Alm. Marga Siregar yang berdomisili di pinangsori.</p> <p>2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya (Ranting Kayu)</p>

#### D. POHON TUMBANG

1.	07 Maret 2024	Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi musibah alam (pohon tumbang) di jalan lintas kelurahan Hajoran pada pukul 20.00 wib sehingga membuat akses jalan tertutup atau tidak dapat dilalui roda dua dan roda empat</p> <p>2. TIM BPBD mengecek lokasi kejadian dan melakukan pembersihan area jalan yang terkena pohon tumbang.</p>
2.	08 Maret 2024	Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan	Tidak ada	<p>1. Telah terjadi musibah alam (pohon tumbang) di dekat pemukiman warga di kelurahan Hajoran dan tidak ada kerusakan pada rumah warga.</p> <p>2. TIM BPBD mengecek lokasi kejadian dan melakukan pembersihan pada area yang terkena dampak pohon</p>



				tumbang.
3.	26 Maret 2024	Jalan Lintas Sitahuis Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	1. Telah terjadi musibah alam (pohon tumbang) di jalan lintas sitahuis pada pukul 17.05 wib sehingga membuat akses jalan tertutup atau tidak dapat dilalui roda empat 2. TIM BPBD mencek lokasi kejadian dan melakukan pembersihan area jalan yang terkena pohon tumbang.
4.	17 April 2024	Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam	Tidak ada	1. Pada hari Selasa malam tanggal 16 April 2024 pukul 20.00 wib telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi dibarengin sama angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang 2. TIM BPBD beserta aparat desa setempat melakukan pembersihan pohon tumbang.
5.	17 September 2024	Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
6.	17 September 2024	Desa Sahadatuon, Dusun II Kecamatan Sukabangun	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi sehingga menimpa rumah warga yang mengakibatkan rusak ringan. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
7.	17 September 2024	Desa Satahi Nauli, Dusun I, Lorong 2 Aek Nabali Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi sehingga menimpa rumah warga yang mengakibatkan rusak ringan. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
8.	17 September 2024	Jln. Abdul Rajak Simatupang, Gg. Sepakat, Kel. Sibuluan Raya Lingkungan IV Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi sehingga menimpa rumah warga yang mengakibatkan rusak berat. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
9.	17 September 2024	Kel. Sarudik, Lingkungan IV Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
10.	17 September 2024	Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh cuaca dengan intensitas hujan disertai angin kencang yang sangat tinggi sehingga menutupin jalan desa dan kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa lewat. 2. Tim BPBD beserta warga setempat melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang tersebut.
11.	29 Oktober 2024	Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon tumbang diakibatkan angin kencang disertai hujan di daerah tersebut. 2. TIM BPBD bersama aparat desa melakukan pembersihan pohon tumbang menggunakan sengso (gergaji mesin) supaya kendaraan dapat lewat.

<b>E. ORANG HANYUT/ TENGGELAM</b>				
1.	14 Januari 2024	Desa Mela Kecamatan Tapanuli Nauli	1 Orang Meninggal Dunia	Pada jam 02.00 pagi turun kebawah jembatan untuk mencari udang. Kemudian paginya warga yang melintas melihat korban sudah terapung
2.	29 Juni 2024	Pulau Putri	3 Orang Meninggal Dunia	1. Telah Terjadi Kapal Tenggelam disekitaran Pulau Putri yang diakibatkan cuaca kurang bagus sehingga menimbulkan gelombang ombak yang besar yang menenggelamkan 1 kapal. 2. TIM BPBD membantu mengevakuasi Korban yang selamat dari kapal tenggelam tersebut.
3.	12 Oktober 2024	Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing	2 Orang Meninggal Dunia	1. Pada saat mau pulang dari ladang dan menyeberang sungai sibundong, kebetulan air sungai deras sehingga membuat perahunya terbalik dan membawa korban hanyut terbawa arus. 2. Tim BPBD, Aparat Desa, Basarnas, TNI, Polri, dan Masyarakat Setempat.
4.	24 November 2024	Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1. Pada Jam 11.00 wib dari muara kolang menuju sibolga terdapat badai dan mereka menjatuhkan jangkar sekitaran pukul 12.00 wib dan kebetulan angin kencang membuat mereka terbawa angin sehingga pada jam 03.00 dini hari. 2. TIM BPBD, BASARNAS, TNI/POLRI beserta Aparat Desa dan masyarakat setempat melakukan pencarian atau penyisiran pinggiran pantai
<b>F. KEBAKARAN RUMAH</b>				
1.	13 Maret 2024	Kelurahan Pasir Bidang Lingkungan VI dan VII Kecamatan Sarudik	1 Orang Meninggal Dunia	1. Pada jam 20.15 wib terjadi kebakaran rumah yang diakibatkan korsleting listrik. 2. TIM BPBD melakukan evakuasi sekaligus cek lapangan.
2.	02 Juli 2024	Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Telah terjadi Kebakaran Rumah pada pukul 09.20 Wib di kelurahan Sibuluan Nalambok yang dimana api berasal dari rumah Bapak Champion Sihombing diduga akibat dari kompor meledak sehingga membakar beberapa rumah yang berderatan dengannya. 2. TIM BPBD, Damkar, TNI dan Polisi beserta Aparat Desa Setempat melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak kebakaran ketempat yang lebih layak.
3.	30 November 2024	Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1. Pada Jam 19.45 wib telah terjadi kebakaran rumah yang diakibatkan korsleting listrik sehingga menghanguskan 1 unit rumah An. NURHALIMA Br.KALIT, 70 Thn. 2. TIM BPBD, TNI/POLRI beserta Aparat Desa dan masyarakat setempat membantu memadamkan api dan melakukan evakuasi barang dan warga yang terkena dampak bencana ke tempat yang lebih baik.
<b>G. ANGIN PUTING BELIUNG</b>				
1.	20 April 2024	Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri	Tidak ada	1. Pada tanggal 19 April 2024 Pukul 22.15 wib telah terjadi bencana angin puting beliung di desa aek horsik yang mengakibatkan kerusakan ringan pada 6 unit rumah warga dan 1 unit panti asuhan (Sion). 2. TIM BPBD beserta Aparat Desa Setempat Meninjau lokasi dan membantu warga membersihkan rumah yang terkena dampak

				bencana angin puting beliung.
2.	22 Mei 2024	Lingkungan III Gg. Kakap Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada jam 08.00 ombak laut dengan volume</li> <li>2. Besar disertai dengan angin kencang diwilayah kelurahan hajoran yang mengakibatkan 2 unit rumah panggung rusak berat/ hancur total.</li> <li>3. TIM BPBD beserta aparat desa setempat melakukan evakuasi sisa puing-puing rumah yang masih tertinggal.</li> </ol>

*Sumber : BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

#### **2.1.3.1.5. Sosial**

Urusan Sosial adalah salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang mengurus bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan dan pendampingan yang pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, yang berpedoman kepada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya. Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 memang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun belum tercapainya kegiatan dari program yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menanggapi adanya bencana yang terjadi baik bencana alam maupun bencana sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Adanya keterbatasan dukungan anggaran Dinas Sosial.
3. Kurangnya jumlah dan kualitas aparatur yang dimiliki Dinas Sosial relatif

terbatas.

4. Kurangnya jumlah pekerja sosial yang dimiliki Dinas Sosial mengingat letak strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat luas, sehingga belum mampu menutupi kebutuhan dalam pendampingan di masyarakat.

Adapun capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 terdiri dari:

#### **a. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Program Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan dan layanan yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disabilitas, masalah sosial, atau keterbatasan lainnya, sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial mencakup berbagai upaya untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Program ini berfokus pada:

1. Pemulihan dan Pengembangan:  
Membantu individu mengembalikan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka.
2. Pengembangan Kemandirian:  
Memberikan pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan agar individu dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.
3. Partisipasi Sosial:  
Memfasilitasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan komunitas.
4. Pencegahan Masalah Sosial:  
Mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul dan mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.

Secara umum, program rehabilitasi sosial bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga, Menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, Mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial tahun 2024 sebesar 77,37%. Dengan capaian kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial sebesar 60,23% dan capaian kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Di Luar Panti Sosial sebesar 94,51%.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 300 orang atau sebesar 75%.

#### **b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Program perlindungan dan jaminan sosial adalah serangkaian upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan dan membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mengurangi dampak negatif dari berbagai risiko sosial, seperti kemiskinan, bencana, dan kehilangan pekerjaan.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebesar 95,19%, dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah yang hasil akhirnya adalah terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sitem Informasi kesejahteraan Sosial-Next Generation). Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada bulan Desember 2024 sebanyak 63.553 KK terdiri dari 220.904 Jiwa.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yaitu terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai /BPNT) dan Program Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
  - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun jumlah keluarga yang memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bulan Desember 2024 sebanyak 17.828 KK. Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai pendamping PKH sebanyak 50 (lima puluh) orang yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan yang terdiri dari Koordinator

Kabupaten 1 (satu) orang dan 49 (empat puluh sembilan) orang sebagai Pendamping Kecamatan. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak 5-7 tahun yang belum masuk SD dari Rumah Tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini mengingat ke-2 (dua) sektor diatas merupakan inti peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

- Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jumlah penerima Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) bulan Desember 2024 sebanyak 28.146 KK.
- Program Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan Kesehatan. Jumlah peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bulan Desember 2024 sebanyak 152.664 Jiwa.

### **c. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

serangkaian upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani dampak bencana, baik bencana alam maupun sosial. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti perlindungan sosial korban bencana, penyediaan logistik, pemulihan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Program Penanganan Bencana Dinas Sosial merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap bencana.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana sebesar

52,92%. Program ini mempunyai kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatannya antara lain penyediaan makanan, penyediaan sandang dan penanganan khusus bagi kelompok rentan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Penyediaan Makanan untuk korban bencana (penyediaan Buffer Stock) di Kabupaten Tapanuli Tengah diberikan untuk korban bencana alam seperti angin puting beliung, dan bencana sosial (kebakaran). Pada Tahun 2024 Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan awal berupa Beras 30 Kg, Telor 1 Papan, Mie Instan 1 Karton per Kepala Rumah Tangga sesuai dengan “Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial” kepada 925 KK 4560 jiwa. Bantuan tersebut ditambah dengan Logistik dari Kementerian Sosial RI berupa Paket Lauk Pauk, Paket Perlengkapan Bayi, Matras, Selimut, Perlengkapan Dapur, dan Sandang. Bantuan yang diberikan berupa Penyediaan Sandang yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 105 KK 500 jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
1. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 berupa Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (SANKEM) Penyaluran Santunan Kematian Keluarga Miskin (SANKEM) bertujuan untuk membantu dan meringankan beban keluarga ahli waris sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di peruntukkan kepada masyarakat atau keluarga miskin atau kurang mampu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada Tahun 2024, sebanyak 111 Jiwa yang sudah menerima SANKEM dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

### 2.1.3.1.6 Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun.

**Tabel 2.28**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020 - 2024**

No	Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	171.470	185.218	201.096	210.141	219.117
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Jiwa	239.854	261.202	267.955	274.672	289.372
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,49	70,90	75.05	76,51	75,72
4	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jiwa	339	7	165	68	
5	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Jiwa	452	252	398	349	
6	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	75	81,13	41,45	18,62	
7	Jumlah Pencari Kerja	Orang	452	252	398	349	
8	Jumlah Pengangguran	Orang	12.447	13,968	14,566	16.754	
9	Jumlah PHK	Orang	68	70	87	76	
10	Jumlah TKI /PMI yang dikirim	Orang	339	339	164	65	
11	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang	2	7	3	5	
12	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	2.830.884	2.830.884,3 2	2.830.884,32	3,019,194,74	
13	Upah Minimum Provinsi	Rupiah	2.499.423	2.499.423, 06	2.522.609, 94	2,710,493,93	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Angkatan Kerja terdiri dari individu yang saai ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 210.141 Jiwa, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 9045 jiwa. Sementara itu, defenisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 15 dan 64 tahun.

Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 274.672 jiwa naik sebanyak sebesar 6.717 jiwa, dibandingkan tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (**labor force participation rate**) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dengan menggunakan rumus (Angkatan Kerja / Populasi Usia Kerja) x 100%. Pada Tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 76,51% mengalami kenaikan 1,46% dibanding Tahun 2022. Tingkat Partisipasi Kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di jumlah penduduk

usia kerja yang ingin melakukan aktifitas ekonomi semakin banyak terdorong oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar pada Tahun 2023 sebanyak 349 jiwa. Pada Tahun 2023, pendaftaran Pencari Kerja sudah menggunakan aplikasi SIAPkerja.kemnaker.go.id. Dari 349 Pencari Kerja, sebanyak 68 jiwa yang ditempatkan. Angka ini diperoleh dari pencari kerja yang sudah ditempatkan yang melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selebihnya sebanyak 201 jiwa tidak dapat diprediksi apakah sudah ditempatkan atau belum karena Pencari Kerja tidak melakukan pelaporan kembali ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan masih proses pembekalan oleh Perusahaan. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sebesar 0,186% yang merupakan perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dengan Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar.

Jumlah Pengangguran pada Tahun 2023 sebanyak 16.754 jiwa, naik sebesar 2.188 jiwa.

Penganggur Terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja;

Data menunjukkan bahwa jumlah Penganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat..menurun. Hal ini disebabkan jumlah lapangan kerja yang terbatas, adanya penambahan Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah.

UMK Tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.3,019,194,74 berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi pekerja/ buruh dan menjaga keberlangsungan usaha.

#### **2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah terkait dengan urusan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan, sebagai berikut:

##### **❖ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga. Kegiatan yang

dilakukan dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat Kepemimpinan Perempuan akar rumput serta terbentuknya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, maka di Kabupaten Tapanuli Tengah dibentuk Kelas Perempuan Mandiri dan Berbudaya (KELAPA MUDA) yang merupakan turunan dari program inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumatera Utara. Adapun dasar pembentukan Kelas Perempuan Mandiri dan Berbudaya di Tapanuli Tengah adalah SK Bupati Tapanuli Tengah nomor 457/DPPA/2024 tanggal 14 Maret 2024, dimana Lembaga Masyarakat yang ditunjuk adalah Perkumpulan Sada Ahmo, dengan fokus desa Kebun Pisang dan desa Sipange. Outputnya : Tersedianya 2 Organisasi menurut SK Bupati.
2. Melaksanakan Munas Perempuan, yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi Perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marginal dalam proses penyusunan RPJMN, Restra, RPJPD dan RPJMD. Musyawarah ini merupakan aspirasi dari tingkat Desa, Kabupaten dan Propinsi yang dibahas secara mendalam pada saat zoom meeting pada tanggal 26 – 27 Maret 2024 dan luring pada tanggal 19-20 April 2024 di Badung Bali. Munas secara luring juga merupakan rangkaian peringatan 135 tahun perjuangan RA Kartini. Presentasi usulan Perempuan disabilitas dan kelompok marginal untuk rencana Pembangunan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
  - a. Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial)
  - b. Perempuan pekerja (Pekerja migrant Indoneisa, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang, kerja layak pekerja dengan disabilitas)
  - c. Penghapusan perkawinan anak
  - d. Ekonomi Perempuan
  - e. Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam pengambilan Keputusan)
  - f. Kesehatan Perempuan (Kesehatan mental, Kesehatan reproduksi remaja dan Perempuan)
  - g. Perempuan dan lingkungan hidup (Pengelolaan sumber daya alam, Masyarakat adat)
  - h. Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
  - i. Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum

Adapun outputnya Tersedianya 1 organisasi berdasarkan usulan program berbasis gender.

3. Ikut serta melaksanakan pembinaan kepada kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara ekonomi kepada Lembaga Masyarakat Pesada Ahmo, melalui kegiatan Rapat Anggaran Koperasi Tahunan Tahun Buku 2024. Adapun Outputnya Tersedianya 1 Organisasi hasil RAT Koperasi pesada Perempuan Tangguh (KESADANTA).
4. Melaksanakan penyusunan proposal CSR dalam rangka upaya pemberdayaan perempuan akar rumput di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan akar rumput. Pengajuan proposal CSR ini disusun dalam rangka implementasi program KELAPA MUDA Kabupaten Tapanuli Tengah. Outputnya adalah Tersedianya 1 Organisasi proposal kewirausahaan.
5. Melaksanakan Pelatihan Fasilitator KELAPA MUDA Tahun 2024 di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Tapanuli Tengah terpilih sebagai salah satu lokus KELAPA MUDA Sumatera Utara. Adapun Outputnya Tersedianya sertifikat pelatihan fasilitator KELAPA MUDA.
6. Melaksanakan evaluasi program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga secara 6 bulanan. Outputnya tersedianya 1 Organisasi capaian program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.
7. Melaksanakan pengumpulan data pengarusutamaan gender dan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) Kabupaten Tapanuli Tengah. Outputnya adalah Tersedianya 1 set dokumen Gender Analysis Pathway (GAP).
8. Monitoring data Pelaku Industri Rumahan PIRT ke Kecamatan di Tapanuli Tengah. Adapun Outputnya Tersedianya 1 Organisasi data pelaku industri rumah tangga.
9. Melaksanakan Pengentryan capaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2024. Outputnya adalah Terlaksananya proses entry dokumen Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2024

#### ❖ **Program Perlindungan Perempuan**

Adapun Program Perlindungan Perempuan memiliki dua kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2024 merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, berupa penerimaan pengaduan dan layanan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan kerja serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2024 sebanyak 8 (delapan) kasus perempuan telah diterima dan diberi layanan pendampingan. Adapun rincian pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

- 6 Kasus Kekerasan dalam rumah tangga telah diberikan pendampingan:
  - 2 Kasus masih tahap proses di Polres Tapanuli Tengah
  - 1 Kasus masih tahap proses di Kejaksaan
  - 2 Kasus masih tahap proses di Pengadilan Agama
  - 1 Kasus telah selesai di Pengadilan Negeri Sibolga
- 2 Kasus Penelantaran telah diberikan pendampingan:
  - 1 Kasus sudah selesai di Pengadilan Agama
  - 1 Kasus masih tahap proses di Polres Tapanuli Tengah.

## **2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2024 disediakan Rumah Aman, sebagai sarana bagi korban kekerasan untuk tempat tinggal sementara yang berada di Jl. Dangol lumban Tobing Gg Saudara Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan. Kondisi Rumah Aman tersebut layaknya rumah biasa, dilengkapi dengan tempat tidur, televisi, kulkas, mesin cuci, peralatan memasak, perlengkapan dapur. Untuk menata Rumah Anak tersebut disediakan petugas untuk melakukan kebersihan setiap harinya. Untuk kenyamanan dan privasi korban kekerasan seksual saat diinterogasi atau diminta penjelasan kejadian, korban akan dibawa ke Rumah Aman. Sehingga korban dapat dengan leluasa menceritakan detail kejadian tanpa didengar oleh siapapun baik pegawai atau yang lainnya kecuali petugas yang menerima pengaduan. Sehingga secara psikologis tidak ada rasa was-was korban untuk menyampaikan semua keterangannya. Pada tahun 2021 korban yang diberikan fasilitas rumah aman sebanyak 5 orang, dan 3 orang pada tahun 2022.

### **❖ Program Pengolahan sistem data gender dan anak**

#### **1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024. Salah satu tujuan Pembangunan pada era milenium adalah menuju

kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di ukur dengan angka indeks pembangunan Gender dan angka indeks pemberdayaan gender. Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan. Data gender dan anak diambil dari OPD dan lembaga yang terkait di Kabupaten Tapanuli Tengah diantaranya : Kejaksaan Negeri Sibolga, Bapas Sibolga, Lapas Kelas II-A Sibolga, Pengadilan Negeri Sibolga, Polres Tapanuli Tengah, Pengadilan Agama Pandan, Kementrian Agama Pandan (Bidang Pendidikan), Cabang Dinas Sibolga, Sekretariat DPRD Tapanuli Tengah, UPTD RSUD Pandan, BKPSDM Tapanuli Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan Pembuatan Buku Data Gender dan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bahan acuan bagi pengambilan kebijakan, analisis dan rencana strategis agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

Hasil dari kegiatan ini , antara lain :

1. Tersedianya data gender menurut jenis kelamin, kondisi sebenarnya, kedudukan perempuan dan laki-laki.
2. Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan di di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
3. Tersedianya data anak menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pengarusutamaan hak dan perlindungan anak (PUHA).
4. Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan di di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
5. Terbitnya Buku data Gender dan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

## **2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaa Perempuan Kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024. Berupa Pembuatan Cetak Leaflet, Roll Up Bunner, Poster serta melakukan sosialisasi tentang kekerasan anak ke sekolah-sekolah Dasar dan SMP di beberapa

Kecamatan, dimana nantinya kegiatan ini dapat di mengerti Anak-Anak dan Guru-Guru sekolah terutama untuk pengetahuan anak sekolah di Kecamatan tentang pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di sosialisasikan di Sekolah-sekolah Dasar dan SMP.

Hasil dan Kegiatan ini, diantaranya :

1. Arti pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap anak agar mereka dapat mengerti dan paham tentang Informasi kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Agar nantinya kekerasan terhadap anak dapat di hindari dan kekerasan anak dapat berkurang kasusnya di keluarga dan di tengah masyarakat dengan di lakukannya pembuatan cetak berupa Leaflet, Roll Up Bunner, Poster dan sosialisasi.

#### ❖ **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan unia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini antara lain:

- a. Meningkatkan Capaian Kabupaten Layak Anak yang Terintegrasi di dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak. Dalam mencapai Kabupaten Layak Anak yang Terintegritas, perlu melakukan kebijakan yang bertumpu pada pemenuhan lima klaster hak anak, mulai dari Hak Sipil dan Kebebasan, Hak memperoleh Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Akan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Akan Pendidikan, Waktu luang dan Kegiatan Budaya, serta Hak Perlindungan Khusus. Serta melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Tengah.

*Output yang diperoleh :*

1. Melakukan koordinasi dengan 15 Organisasi Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  2. Nilai yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Kabupaten layak Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Penilaian KLA per tanggal 19 Juni 2024 sebesar 704.77 poin
- b. Mengikuti Kegiatan Acara Peringatan Hari Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jl. Jend. Sudirman No. 41 Kota Medan

pada tanggal 18 Desember sampai 20 Desember 2024, acara peringatan hari Anak Nasional Tahun 2024 di aula Tengku Rizal Nurdin Jl. Jend. Sudirman No. 41 Kota Medan pada tanggal 18 Juli sampai 30 Juli 2024. Adapun tujuan mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan terkait pentingnya peningkatan pemenuhan hak Ibu dan anak di kabupaten.

#### ❖ **Program Perlindungan Khusus Anak**

Adapun Program Perlindungan Khusus Anak memiliki dua kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, berupa penerimaan pengaduan dan layanan pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH), baik Anak sebagai korban, Anak sebagai Saksi Maupun Anak Pelaku yang membutuhkan layanan pendampingan dalam proses penegakan hukum. terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2024 sebanyak 30 (Tiga Puluh) kasus anak telah diterima pengaduannya dan diberi pelayanan pendampingan.

Adapun rincian pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

- 19 Kasus Pelecehan seksual telah diberikan pendampingan:
  - 12 Kasus masih proses di Polres Tapanuli Tengah
  - 4 Kasus telah selesai di Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga
  - 1 Kasus telah selesai dengan Proses Mediasi di Kecamatan
  - 1 Kasus telah selesai dengan Proses Mediasi di Polres Tapanuli Tengah
  - 1 Kasus masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga
- 6 Kasus Penelantaran Anak telah diberikan pendampingan:
  - 3 Kasus telah selesai dengan proses Mediasi di Kantor PPPA Tapanuli Tengah
  - 1 Kasus masih proses di Kelurahan
  - 2 Kasus =telah selesai di Polsek Pandan
- 2 Kasus Kekerasan Fisik telah diberikan pendampingan :
  - 1 Kasus telah masih proses di Polres Tapanuli Tengah
  - 1 Kasus telah selesai dengan proses mediasi di Sekolah
- 1 Kasus Pemenuhan Anak telah diberikan Pendampingan dan masih proses di Polres Tapanuli Tengah
- 2 Anak sebagai saksi kasus pelecehan seksual telah diberikan pendampingan dan kasus telah selesai di Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga

- Selain itu dalam kegiatan ini juga disediakan pemeriksaan psikolog bagi korban kekerasan dan sebanyak 10 orang telah diberikan layanan psikolog dengan jumlah sesi sesuai kondisi korban.

#### 2.1.3.1.8. Pangan

Data bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah pada awal hingga akhir tahun 2023 sangat beragam, mulai dari kebutuhan, ketersediaan serta komoditi yang sangat efektif. Sepanjang tahun 2023 ketersediaan komoditi beras di pasar tradisional cukup lancar, namun informasi harga yang berbeda dari rata-rata harga beberapa titik pantau/pasar dalam wilayah masing-masing. Berikut disajikan data Pemantauan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023.

**Tabel 2.29**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023**

No	Komoditi	Kebutuhan		Ketersediaan		
		Per bulan (ton)	Per hari (ton)	Per bulan (ton)	Per hari (ton)	
					H-1	H
1	Beras	4.457,30	148,58	6.877,30	228	229,2
2	Jagung	123,47	4,12	123,4	3,9	4,11
3	Cabai merah	139,36	4,65	44,8	1,35	1,49
4	Cabai rawit	100,47	3,35	36,6	1,15	1,22
5	Bawang putih	67,85	2,26	33,925	1,10	1,13
6	Bawang merah	123,15	4,11	61,57	2,03	2,05
7	Daging sapi	5,8	0,19	2,9	1,02	1,1
8	Daging ayam	387,86	12,93	193,93	6,40	6,46
9	Telur	253,47	8,45	126,7	4,12	4,22
10	Minyak goreng	734,53	24,48	367,2	12,10	12,24
11	Gula	346,31	11,54	173,15	5,70	5,77

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

#### 2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senantiasa berpedoman kepada adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan dimana prinsip pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah dengan diberi ganti kerugian yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya, dan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memerlukan

tanah untuk dapat memperoleh tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Yang berlaku.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2023**

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Buah	1	1	2	1	
2.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	Buah	2	2	3	2	
3.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	50	66.67	50	
4.	Jumlah Advis Lokasi	Buah	1	-	-	-	
5.	Permohonan Advis Lokasi	Buah	-	-	1	1	
6.	Persentase Penyelesaian Advis Lokasi	%	-	-	-	-	

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024*

Untuk menghindari adanya permasalahan dilapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah, sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat terinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

#### **2.1.3.1.10. Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi sebanyak 11 perusahaan. Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 45,45%. Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL sebanyak 2 perusahaan. Berikut disampaikan capaian kinerja urusan lingkungan hidup sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.31**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang diawasi	Perusahaan	11	11	11	11	
2	Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL	Perusahaan	11	11	11	11	
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	Persen	45,45	45,45	45,45	27,27	
4	Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL	Perusahaan	9	3	2	1	
5	Uraian Penjelasan Kasus Lingkungan Hidup						
	1. Pengaduan masyarakat kelurahan Sarudik tentang pembuangan limbah PT. Toba Surimi	Kasus (selesai)					
	2. Penambangan bahan galian C oleh PT. CIPTA DAYA PERKASA di Kecamatan Pinangsori	Kasus (selesai)					
	3. Peternakan babi yang menimbulkan keresahan masyarakat di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan	Kasus (selesai)					
	4. Keluhan masyarakat atas sedimentasi akibat galian tanah ke kawasan permukiman masyarakat	Kasus (selesai)					
	5. Keberatan masyarakat terhadap bau yang ditimbulkan oleh peternakan bebek di Kecamatan Tukka	Kasus (selesai)					
	6. Penambangan mineral jenis batu di luar kawasan oleh PT. ANRA	Kasus (selesai)					
	7. Keberatan masyarakat sekitar PT. Mujur Timber karena sebaran debu hasil pengolahan kayu	Kasus (selesai)					
	8. Perambahan mangrove oleh PT. Nauli Sawit	Kasus (selesai)					
	9. Longsor yang disebabkan oleh pembangunan perumahan citra hijau lestari	Kasus selesai					
	10. Dugaan pencemaran air laut oleh PLTU Labuan Angin oleh limbah pembakaran batubara	Kasus selesai (tidak terbukti)					
	11. PT. Horizon, Keberatan Masyarakat atas dugaan pencemaran dan temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus selesai (dokumen sudah diperbaharui)	√				
	12. PT. ASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)	√				
	13. PT Tobasurimi, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)	√				
	14. CV. Roganda, dugaan perusakan lingkungan	Kasus selesai (CV. Roganda telah memiliki dokumen perizinan)	√				
	15. PT. Mujur Timber, dugaan pencemaran lingkungan	Kasus selesai (tidak terbukti mencemari)	√				

		lingkungan)					
	16. PT. KASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)	√				
	17. Penambangan batu di Kec. Sitahuis	Kasus selesai (kegiatan ditutup)	√				
	18. Dugaan pencemaran air terhadap pelurusan sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi di Kecamatan Sibabangun	Kasus selesai		√			
	19. Dugaan pencemaran air sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi	Kasus selesai		√			
	20. Keberatan masyarakat atas penutupan daerah genangan air di Kelurahan Binasi Kec. Sorkam Barat	Kasus selesai		√			
	21. Keberatan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air yang berdampak terhadap ekosistem ikan pada lubang larangan di kecamatan Lumut	Kasus selesai					
	22. Keresahan masyarakat terhadap tangki timbun dan permintaan tembok penahan oleh PT. Indera Angkola	Kasus selesai					
	23. Keresahan masyarakat atas dugaan reklamasi, penebangan mangrove dan penggerusan bukit karena pembangunan perumahan Grand Tapian Nauli di Kecamatan Tapian Nauli	Proses ditangani Polres Tapteng					
	24. Laporan masyarakat atas dugaan pencemaran air karena galian C di sungai Pinangsori di Kecamatan Pinangsori	Kasus selesai semua perusahaan pertambangan memiliki dokumen perizinan					
	25. Laporan An. Tarida sigalingging atas, pembukaan lahan perkebunan di Kecamatan Sosorgadong yang ditangani Polda Prov. Sumatera Utara					(masih proses penanganan Polda Sumut)	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

#### 2.1.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluaran (output) kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah terlaksananya Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu kepada penduduk wajib KTP-el; Terwujudnya pendataan penduduk wajib KTP-el yang akurat dan akuntabel; Terciptanya administrasi kependudukan yang baik; serta terlaksananya kegiatan KTP-el dengan baik. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el sebanyak 240.634 orang, sementara jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 256.978 orang, dengan demikian persentase indikator pengurusan KTP-el sebesar 94,42 persen. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 187.720 orang dari seluruh jumlah

penduduk 369.482 orang, dengan demikian capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 50.81 persen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kepemilikan KTP-el, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran adalah Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Perekaman KTP-el secara Mobile, Pengurusan Kartu Keluarga) dan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kawin, Akta Kematian dll) di 20 Kecamatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Kurangnya kesadaran penduduk dalam pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Perangkat SIAK dan perangkat KTP-el di kecamatan sebagian besar dalam kondisi kurang baik sehingga pelayanan penataan administrasi kependudukan terhambat.
- c. Minimnya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan jarak ibu kota kabupaten dengan kecamatan cukup jauh sehingga administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik.
- d. Dengan mempertimbangkan factor geigrafis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanana kepada masyarakat.

Solusi untuk pemecahan masalah adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling, Pengadaan Perangkat KTP-el, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
- b. Renovasi Pelayanan Dukcapil (Urus 1 Dokumen dapat 3 sekaligus dokumen kependudukan)
- c. Pelayanan Jemput Bola pengurusan Administrasi Kependudukan
- d. Perencanaan Gerakan Indonesia Sadar Admininduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
- e. Go Digital dengan sarana, materi dan SDM yang bekerja sangat baik, membangun Indonesia yang jauh lebih baik dalam system digital.
- f. Inovasi Pelayanan dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder internal dan eksternal tentang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranya melalui tetap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui media cetak, leaflet, pamphlet, buku saku, spanduk dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif dan berkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan baik.

**Tabel 2.32**

## Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2020– 2024

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	Jiwa	210.957	217.500	223.742	233.573	240.634
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jiwa	253.056	252.496	256.929	256.837	256.978
3	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	83,36	86,14	87,08	90,94	94,42
4	Jumlah Perekaman KTP-el	Buah	210.957	220.125	223.742	233.573	242.633
5	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jiwa	127.741	150.212	162.254	175.979	187.720
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	365.344	365.606	366.361	366.982	369.482
7	Jumlah KK	KK	91.887	91.621	93.272	95.727	99.461
8	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jiwa	183.861	184.038	184.459	184.568	185.732
9	Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	181.483	181.568	181.902	182.414	183.750
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	34,96	41,09	44,29	47,95	50,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

### 2.1.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai SKPD yang melayani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dapat disebut juga dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dibedakan atas sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan. Dalam memberikan pelayanan, kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki adalah salah satu faktor yang menentukan baiknya tingkat pelayanan yang diberikan. Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 21 Orang, terdiri dari 12 Laki-laki dan 9 Perempuan. Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 2.33**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.1	Persentase pengentasan desa sangat tertinggal dan tertinggal	72,33%				72,32%	
1.2	Persentase peningkatan	27,67%				36,47%	

	status desa berkembang, maju dan mandiri						
1.3	Jumlah LSM	26	26		0	0	
1.4	LPM berprestasi	0			0	0	
1.5	PKK aktif	7114	7130	7140	7140	7114	
1.6	Posyandu aktif	382	398		402	386	
1.7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	4	7		2	5	
1.8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	4	7		2	5	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tahun 2022 ditargetkan 235 untuk Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan hal tersebut dapat dicapai dengan angka yang sama yaitu 235, Sama halnya dengan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK yang mencapai target realisasi 6 pada Tahun 2022, dan untuk PKK Aktif juga mencapai target realisasi pada Tahun 2022 yaitu mencapai angka 7.140.

#### 2.1.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

- a. Prevalensi peserta KB aktif
  - Jumlah Peserta Program KB Aktif tahun 2024 sebanyak 28.392 orang, tahun 2023 sebanyak 24,146 peserta pada tahun 2022 sebanyak 17,266 peserta;
  - Jumlah Pasangan usia subur tahun 2024 sebanyak 44.415 orang, tahun 2023 sebanyak 41,501 pasangan Usia Subur tahun 2022 sebanyak 39,415 Pasangan Usia Subur;
  - Capaian kinerja sebanyak 63,92%.
- b. Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa Kelurahan
  - Jumlah Desa Kelurahan sebanyak 215 peserta;
  - PLKB/ PKB PNS Sebanyak 84 Orang, PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 164 orang pada tahun 2024. PLKB/ PKB PNS Sebanyak 65 Orang, PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 193 orang pada tahun 2023. PLKB/ PKB PNS Sebanyak 63 Orang PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 218 orang pada tahun 2022.

#### 2.1.3.1.14. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berhubung Terminal Baru Pandan belum dioperasikan, maka kegiatan ini difokuskan kepada pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai peranan dalam pengoperasian terminal. Pihak terkait tersebut antara lain Dinas PUPR, Dinas Perindag, Polisi Lalu Lintas, Organda dan lain-lain. Selain pengawasan dan koordinasi kegiatan ini juga

diutamakan perawatan dan pembersihan terminal secara rutin setiap hari demi terciptanya kenyamanan dan kebersihan terminal.

**Tabel 2.34**  
**Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Jenisnya						
	a. Perdesaan	Unit	571	578	578	426	415
	b. Truk	Unit	-	-	-	-	-
	c. Becak Mesin	Unit	-	-	-	615	1090
	d. Ojek	Unit	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pengusaha Angkutan Umum	Usaha	8	8	8	8	8
3	Penerbitan Izin						
	a. Trayek Perdesaan	Buah	8	8	8	8	8
	b. Usaha Angkutan	Buah	6	6	6	6	6
4	Jumlah Terminal	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah KIR/STUK Angkutan Umum	Unit	-	-	-	-	-
	a. Mobil Penumpang	Unit	-	-	-	-	-
	b. Bis	Unit	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Unit	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Unit	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Unit	-	-	-	-	-
6	Lama Pengujian KIR/STUK						
	a. Mobil Penumpang	Hari	-	-	-	-	-
	b. Bis	Hari	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Hari	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Hari	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Hari	-	-	-	-	-
7	Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengujian	Unit & Manual	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

#### 2.1.3.1.15. Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pertama, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif dan kedua, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan adalah Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan kegiatan strategis provinsi yaitu Pembangunan Satu Data Digital Daerah.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui pemberitaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik/masyarakat, dan sosial kemasyarakatan di berbagai kanal media (media elektronik, media online, media cetak, dan media sosial) dan menjalin sinergitas dan kemitraan dengan media massa, serta para pemangku kepentingan. Selain itu, juga mendorong peningkatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID). Pada tahun 2022 dan 2023, Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tapanuli Tengah kategori “Cukup Informatif” oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada tahun 2024 ini ditargetkan Kabupaten Tapanuli Tengah kategorinya semakin Informatif dengan meningkatkan peran dan kualitas PPID Kabupaten Tapanuli Tengah dan mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal media yang ada. Pj. Bupati Tapanuli Tengah juga telah menerbitkan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor 500.12.1/077/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Hal: Keterbukaan Informasi Publik, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga ke depan tujuan atas pelaksanaan program ini dapat terwujud.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga melaksanakan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu melalui Fasilitasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah, dan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Melalui program ini maka akan mewujudkan transformasi digital dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan semakin baik, cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga mendorong terwujudnya Tapanuli Tengah Smart City, aplikasi Satu Data Kabupaten Tapanuli Tengah, dan meningkatnya Literasi Digital Masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Kementerian PANRB tahun 2022 indeks sebesar 1,62 (predikat Kurang) dan meningkat pada tahun 2023 indeks sebesar 1,87 (predikat Cukup). Pada tahun 2024 ditargetkan hasil evaluasi SPBE Kabupaten Tapanuli Tengah dengan predikat Baik. Pada tahun 2024 ini sebanyak 21 aplikasi domain-sub domain, telah diinisiasi penyusunan Arsitektur SPBE OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, penyempurnaan regulasi, penerapan transaksi non tunai dan/atau digital, dan penerapan Sertifikat Elektronik, serta pengembangan kolaborasi program aplikasi sehingga penerapan SPBE di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat dan baik.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga melaksanakan Program Statistik Sektorial melalui Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektorial, dan Penerapan Satu Data Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, melalui Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

### 2.1.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2022 berjumlah 394 unit koperasi, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 391 unit koperasi sesuai data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2018-2023**

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Manduamas	16	17	15	15	15	15
2.	Sirandorung	15	15	15	15	15	14
3.	Andam Dewi	11	12	12	12	12	12
4.	Barus	25	25	26	26	26	26
5.	Barus Utara	2	2	2	2	2	2
6.	Sosorgadong	8	8	9	9	9	6
7.	Pasaribu Tobing	3	3	4	4	4	4
8.	Sorkam Barat	20	20	18	19	19	12
9.	Sorkam	12	13	16	16	17	20
10.	Kolang	23	23	24	25	25	23
11.	Tapian Nauli	24	25	25	25	25	26
12.	Sitahuis	6	6	6	6	6	6
13.	Pandan	99	102	103	106	107	105
14.	Tukka	11	11	11	12	12	12
15.	Badiri	21	22	23	24	24	21
16.	Pinangsori	14	14	14	18	19	26
17.	Lumut	8	8	9	9	9	9
18.	Suka Bangun	3	3	3	3	3	3
19.	Sibabangun	15	15	17	17	17	18
20	Sarudik	23	23	27	28	28	28
Jumlah		<b>359</b>	<b>368</b>	<b>379</b>	<b>391</b>	<b>394</b>	<b>386</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

**Tabel 2.36**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2023**

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jumlah UMKM				
1	Manduamas	1.736	1.736	848	457	457
2	Sirandorung	1.159	1.159	1.069	222	222

3	Andam Dewi	722	722	165	535	535
4	Barus	2.448	2.448	2.466	649	649
5	Barus Utara	328	328	439	342	342
6	Sosorgadong	881	881	2.204	1.363	1.363
7	Pasaribu Tobing	938	938	554	1.753	1.753
8	Sorkam Barat	1.118	1.118	1.186	820	820
9	Sorkam	1.395	1.395	2.767	583	583
10	Kolang	1.361	1.361	386	535	535
11	TapianNauli	1.377	1.377	2.002	31	115
12	Sitahuis	375	375	382	137	137
13	Pandan	3.897	3.997	5.790	1.742	1.742
14	Tukka	802	802	1.086	699	699
15	Badiri	1.366	1.366	3.042	682	682
16	Pinangsori	1.925	1.925	2.691	1.057	1.057
17	Lumut	606	787	1.685	3.877	3.877
18	SukaBangun	431	431	158	624	624
19	Sibabangun	1.088	1.088	1.322	592	592
20	Sarudik	1.232	1.432	1.726	2.105	2.105
<b>Jumlah</b>		<b>25.165</b>	<b>25.666</b>	<b>31.968</b>	<b>18.805</b>	<b>18.889</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pada tahun 2023, terdapat **18.889** jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah UMKM terbanyak pada Kecamatan Lumut dengan jumlah 3.877 UMKM. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan. pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (*knowledge based economy*) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya.

#### 2.1.3.1.17. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan

kinerja penanaman modal yaitu Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Keluaran (output)nya yaitu melalui koordinasi pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/ regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

#### **2.1.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga**

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Kabupaten Tapanuli Tengah juga berperan aktif mengikuti setiap kegiatan baik kepemudaan dan olah raga baik lokal maupun tingkat provinsi dan nasional.

#### **2.1.3.1.19. Perpustakaan**

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki sebuah perpustakaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain memiliki buku-buku yang tersedia di gedung perpustakaan, maka untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki Dua unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang digunakan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari lokasi perpustakaan. Adapun buku koleksi dan sarana yang tersedia di Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan gedung perpustakaan dapat dirinci sebagai berikut :

##### **1. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) Pertama (I) Tahun 2017 memiliki :**

- Buku bacaan : 800 eksemplar
- Mesin genset : 1 Unit
- Laptop : 1 Unit
- TV LED : 1 Unit
- Modem : 1 Unit
- Proyektor : 1 Unit

##### **2. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) ke II Tahun 2023 memiliki :**

- Buku Bacaan : 500 eksemplar
- TV LED : 1 Unit
- Speaker Multimedia : 1 Unit
- Mesin Genset : 1 Unit
- UPS (Uninter Power Supplay) : 1 Unit
- Sebagai pasokan listrik cadangan
- DLS ( Digital Library Sistem) : 1 Unit
- Sistem Perpustakaan Digital

##### **3. Perpustakaan Daerah, memiliki :**

###### **A. Buku bacaan:**

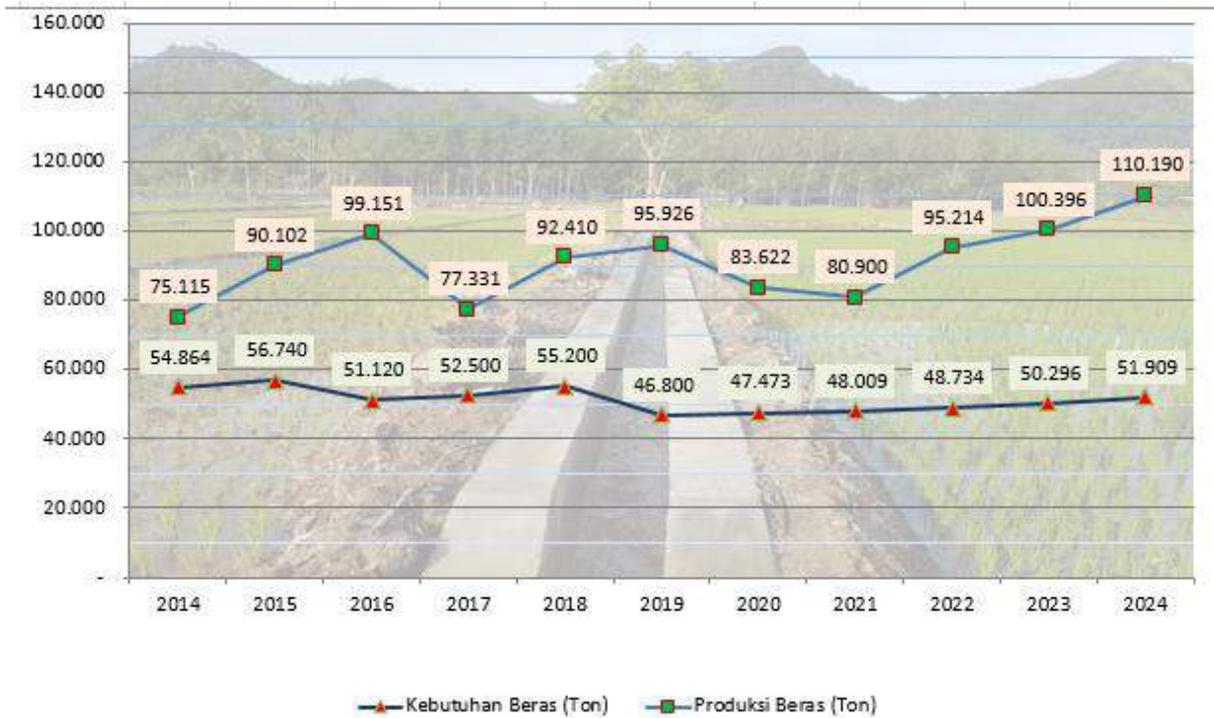
- Koleksi Tahun 2017 : 9,181 eksemplar
  - Pengadaan Tahun 2018 : 2,259 eksemplar
  - Pengadaan Tahun 2019 : 2,520 eksemplar
  - Pengadaan Tahun 2020 : -
  - Pengadaan Tahun 2021 : -
  - Hibah Bank Indonesia : 300 eksemplar
  - Hibah Perpustakaan RI Tahun 2018 : 572 eksemplar
  - Hibah Prov. Sumatera Utara : 264 eksemplar
  - Hibah Perpustakaan RI Tahun 2021 : 300 eksemplar
  - Hibah Perpustakaan RI Tahun 2022 : 700 eksemplar
  - Buku Digital Tahun 2022 : 885 eksemplar
  - Pengadaan Tahun 2024 : 1486 jumlah Buku
  - Automasi Layanan Perpustakaan Inslite 6 unit Dari Kegiatan Dana DAK Tahun 2021
- B. Pojok Baca Digital Tahun 2022 : 1 Unit
- C. Sepeda Motor Perpustakaan Keliling Tahun 2021 : 1 Unit
- D. Sepeda Motor Pustakawan Tahun 2024 : 3 Unit

**2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan**

**2.1.3.2.1. Pertanian**

Perkembangan kebutuhan beras dan produksi beras dapat dilihat pada Grafik di bawah, terlihat pada grafik tersebut bahwa selama tahun 2014-2024 Kabupaten Tapanuli Tengah mampu mencapai swasembada beras. Pada tahun 2023 jumlah kebutuhan beras sebesar 50.296 Ton dan Produksi beras sebesar 100.396 Ton.

**Grafik 2.2**  
**Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014 - 2024**



Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025 (ASEM)

Produksi beras pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, sejalan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2024. Pada tahun 2023 luas panen hanya 37.408 Ha sedangkan pada tahun 2024 luas panen meningkat menjadi 38.777 Ha.

Data perkembangan populasi ternak pada tahun 2024, dari beberapa komoditi mengalami penurunan populasi dibandingkan tahun 2023 kecuali ternak Babi dan Ayam pedaging. Untuk lebih jelasnya data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.37**  
**Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020 - 2024**

No.	Komoditi	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	2.736	2.958	2.803	2.925	1.784
2.	Kerbau	10.927	11.638	10.518	10.917	6.581
3.	Kambing	14.488	13358	11.971	12.804	7.980

4.	Domba	512	977	1.087	1.252	877
5.	Babi	30.316	9.689	6.903	9.158	12.173
6.	Ayam Kampung	435.689	412.674	397.509	407.334	140.829
7.	Ayam Petelur	4.000	2.500	9.500	9.000	9.000
8.	Ayam Pedaging	224.400	292.000	424.000	467.000	500.000
9.	Itik Unggas	14.043	15.612	14.128	9.807	6.972
10.	Itik Manila	9.419	18.177	10.316	11.020	7.073
11.	Burung Puyuh	0	0	3.300	4000	4.000
12.	Merpati	1.928	2.000	2.320	2177	2.200
13.	Kelinci	343	104	132	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Beberapa tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan kakao. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain produksi karet tahun 2024 sebesar 20.660,69 ton. Demikian juga produksi kelapa tahun 2024 sebesar 1.053,85 ton. Produksi kelapa sawit rakyat tahun 2024 sebesar 293.024,4 ton. Luas Pertanaman, produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah Tahun 2023 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**  
**Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023**

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	KK Petani
1	Karet	20.416,49	20.660,685	1.012	26.994
2	Kelapa	1.078,72	1.053,845	977	6.441
3	KelapaSawit	16.836,12	293.024,4	17.404	547
4	Kakao	6,56	7,02	1.070	3.804
5	Aren	31	78	2,516	264
6	Pala	-	-	-	-

7	Kopi Robusta	9	9	1.000	357
8	Cengkeh	-	-	-	-
9	Kemenyan	-	-	-	-
10	Kapuk	-	-	-	-
11	Lada	-	-	-	-
12	Kulit Manis	-	-	-	-
13	Kemiri	2	8,50	4.250	197
14	Gambir	-	-	-	-
15	Pinang	203,75	285,7	1.402	193

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

#### 2.1.3.2.2. Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, air permukaan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai SK. 44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 54.975,11 Ha.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 114.537,71 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.39**  
**Data Luas Hutan berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)			
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Areal Penggunaan Lahan
1.	Sibabangun	1.545,00	4.729,20	-	2.545,00
2.	Sukabangun	-	-	-	1.950,00
3.	Lumut	475,00	-	-	1.325,00

4.	Pinangsori	853,00	-	-	6.924,00
5.	Badiri	735,00	-	-	6.197,00
6.	Pandan	-	-	-	300,00
7.	Sarudik	3.312,50	-	-	325,50
8.	Tukka	7.625	1.062,21	-	3.510
9.	Sitahuis	8750,90	-	-	-
10.	Tapian Nauli	6.062,40	562,50	-	1.265,63
11.	Kolang	7.312,51	1.312,50	7.312,50	4.768,75
12.	Sorkam	-	-	9.312,30	1.618,75
13.	Sorkam Barat	875,00	-	3.812,50	1.656,25
14.	Pasaribu Tobing	655,50	-	4.937,50	-
15.	Sosorgadong	13.984,30	-	3.875,00	1.406,25
16.	Barus	-	-	-	310,25
17.	Barus Utara	-	-	48,00	521,00
18.	Andam Dewi	1.879,00	-	6.687,20	1.312,5
19.	Sirandorung	575,00	-	5.755,00	2.562,5
20.	Manduamas	335,00	-	10.156,19	8.911,87
<b>Jumlah</b>		<b>54.975,11</b>	<b>7.666,41</b>	<b>51.896,19</b>	<b>47.410,75</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah dipadukan dengan Hasil Perhitungan BPKH Wilayah-I Medan terhadap SK Menteri Kehutanan RI No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005

Luas lahan kritis di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seluas 95.469,25 Ha, dimana luas lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 54.890,25 Ha sedangkan lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 40.579,00 Ha.

#### 2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan “C” sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan “A” seperti batubara, uranium dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut.

Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut :

- Granit : >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis. Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik



lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat.

- Lempung : ± 31.500.000 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran < 0,002 mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
- Tras : ± 18.900.000 ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
- Pasir Kuarsa dan Batu Pasir : ± 766.090.000 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
- Sirtu (Pasir dan Batu) : > 7.938.750 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif.

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.



4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 2.1.3.2.4. Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata mendorong untuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan, namun penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tahun 2024 tidak menjadi prioritas dikarenakan kurangnya anggaran sehingga berdampak pada nihilnya objek wisata terbangun dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana di objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, semoga di tahun selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas kinerja Pemkab Tapanuli Tengah untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan yang memiliki sasaran untuk sektor pariwisata yaitu : “Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif, namun pada Tahun 2024 kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan jumlah 340.332 orang dengan rincian Wisatawan Nusantara sebanyak 340.288 jiwa dan wisatawan mancanegara sebanyak 44 jiwa, wisatawan mancanegara banyak mengunjungi wisata sejarah yaitu makam mahligai dan papan tinggi.

**Tabel 2.40**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah destinasi wisata terbangun	Unit	2	2	0	0	0	0
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	215	0	0	11	40	44
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	228.978	331.206	335.678	371.132	384.100	340.288
4	Kunjungan Wisata	Orang	229.193	331.206	335.678	371.143	384.140	340.332

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

#### 2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan

kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepatguna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan system keramba, keramba jarring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan system ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan *restocking* di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas, sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumberdaya perikanan tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

**Tabel 2.41**  
**Produksilkan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Penangkapan</b>						
	a. Laut	Ton	42.321	41.453	41.468	41.468	41.504
	b. PerairanUmum	Ton	1.290	1.300	-	-	-
<b>2</b>	<b>Budidaya</b>						
	a. Kolam	Ton	801.271	813.720	345,6	345,6	245,9
	b. Sawah	Ton	-	-	-	-	-
	c. Tambak	Ton	2.663	12.000	496,4	484,4	400
	d. BudidayaLaut	Ton	1.210	1.240	-	-	-
	e. Keramba Jaring Apung (KJA)	Ton	1.856	1.866	3	3	6

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

**Tabel 2.42**



**Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tahun 2020-2024**

No	Jenis Perahu	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perahu Tanpa Motor	Unit	110	100	100	105	112
2	Perahu Motor Tempel	Unit	1.472	1.502	1.459	1.432	500
3	Kapal Motor	Unit	1.020	1.100	1.010	1.030	532

*Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**Tabel 2.43  
Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan  
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024**

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nelayan Penuh	Orang	14.087	13.145	14.087	14.093	15.223
2	Nelayan Sambilan	Orang	9.889	11.038	5.326	5.337	9.511
3	Nelayan Sambilan Tambahan	Orang	1.094	903	5.637	5.620	-

*Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025*

**2.1.3.2.6. Perdagangan**

Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rakyat yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Meskipun harus bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional masih tetap menjadi salah satu segmen ekonomi yang sangat diandalkan oleh suatu daerah.

Pemerintah daerah yang masih memiliki masyarakat dengan daya beli yang rendah sangat mengandalkan keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran roda perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persampahan. Pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian masyarakat yang layak untuk dipertahankan eksistensinya dan dikembangkan agar tidak hilang semata karena hadirnya pasar modern.

Tahun 2024 terdapat 23 Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah, 20 Pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 3 Pasar di kelola oleh swasta. Adapun Kondisi 20 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah masih tergolong kurang baik dan belum memenuhi persyaratan SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tidak adanya Revitalisasi / Pembangunan Pasar dan biaya pemeliharaan pasar

mengakibatkan banyaknya atap pasar yang sudah mengalami kebocoran, lantai yang rusak, dan Fasilitas lain seperti kamar mandi yang rusak berat. Hal ini menjadi kendala dalam pengutipan retribusi pelayanan pasar, pedagang tidak memberikan kewajibannya disebabkan fasilitas pasar yang kurang baik.

Revitalisasi/Pembangunan Pasar ini membutuhkan anggaran yang besar, dibutuhkan dukungan dana APBN melalui DAK atau Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui usulan Proposal dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi untuk 4 (Empat) tahun terakhir ini Pembangunan/Revitalisasi Pasar tidak ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**  
**di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023**

No	INDIKATOR	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian								
1	Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	77,8	77.25	88,8	88,56	90,00	89.42	92,00	88.00	95.00	88.00
2	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan (%)	58	56	66	65	75	74	77	72	78	72

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah*

Dari data diatas Indikator Persentase pasar yang tergolong baik dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian target 77,25% dan pada tahun 2021 mencapai 88,56% dan untuk tahun 2022 dari target 90,00% dengan capaian 89.42 persen, tahun 2023 dari target 92.00 dengan capaian 88% dan untuk tahun 2024 juga dengan capaian 88,00%. Untuk tahun 2024 tidak ada kegiatan Revitalisasi/Pembangunan Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebatas kegiatan Pengelolaan Pasar dengan kegiatan yaitu melaksanakan monitoring pasar dan Intensifikasi Retribusi Pasar untuk 20 Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target.

#### **2.1.3.2.7. Perindustrian**

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.129 usaha industri meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.467 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.45**



**Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)  
di Kabupaten Tapanuli Tengah**

NO	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha								
1	Manduamas	29	IKM	29	IKM	29	IKM	31	IKM		
2	Sirandorung	193	IKM	239	IKM	260	IKM	283	IKM		
3	Andam Dewi	55	IKM	67	IKM	81	IKM	88	IKM		
4	Barus	173	IKM	179	IKM	180	IKM	186	IKM		
5	Barus Utara	76	IKM	77	IKM	77	IKM	78	IKM		
6	Sosorgadong	62	IKM	62	IKM	62	IKM	66	IKM		
7	Pasaribu Tobing	48	IKM	50	IKM	50	IKM	51	IKM		
8	Sorkam Barat	18	IKM	22	IKM	26	IKM	27	IKM		
9	Sorkam	118	IKM	123	IKM	137	IKM	151	IKM		
10	Kolang	94	IKM	94	IKM	94	IKM	100	IKM		
11	Tapian Nauli	98	IKM	99	IKM	100	IKM	100	IKM		
12	Sitahuis	29	IKM	29	IKM	30	IKM	30	IKM		
13	Pandan	607	IKM	612	IKM	620	IKM	629	IKM		
14	Tukka	92	IKM	92	IKM	96	IKM	96	IKM		
15	Badiri	105	IKM	105	IKM	109	IKM	110	IKM		
16	Pinangsori	119	IKM	121	IKM	129	IKM	129	IKM		
17	Lumut	21	IKM	21	IKM	21	IKM	21	IKM		
18	Sukabangun	13	IKM	13	IKM	13	IKM	13	IKM		
19	Sibababngun	28	IKM	28	IKM	28	IKM	28	IKM		
20	Sarudik	244	IKM	245	IKM	250	IKM	250	IKM		
		<b>2222</b>	<b>IKM</b>	<b>2307</b>	<b>IKM</b>	<b>2392</b>	<b>IKM</b>	<b>2467</b>	<b>IKM</b>		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

**2.1.3.2.8. Transmigrasi**

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah transmigrasi yang saat ini telah berubah status menjadi Eks-Transmigrasi yang terletak pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah luas wilayah yang berbeda-beda. Wilayah tersebut sudah berubah nama seperti yang terdapat di beberapa kecamatan yang terdiri dari kecamatan Manduamas, kecamatan Sirandorung, kecamatan Kolang dan kecamatan Sukabangun.

Kecamatan Manduamas terdiri dari 1 (satu) kelurahan 5 (lima) desa. Pada saat ini setelah pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Manduamas dan kecamatan Sirandorung terdiri dari :

1. Desa Pagaran Nauli Kecamatan Manduamas;
2. Desa Sarma Nauli Kecamatan Manduamas;
3. Desa Tambahan Nanjur Kecamatan Manduamas;
4. Desa Pagaran Baru Kecamatan Manduamas;
5. Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung;
6. Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung.



Sesuai dengan wilayah Transmigrasi sebelumnya berada di kecamatan Kolang yang pada saat ini sudah menjadi Eks-Transmigrasi yang terdiri dari 2 (dua) desa. Yang terdiri dari SP :

1. Makarta Nauli;
2. Desa Rawa Makmur.

Kecamatan Sukabangun yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah Eks-Transmigrasi yang saat ini sudah devenitif menjadi desa pada kecamatan Sukabangun yaitu Pulo Pakkat II.

Dari jumlah kelurahan dan desa Eks-Transmigrasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada Eks-Transmigrasi seperti pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi pemberian bantuan untuk peningkatan ekonomi sosial dan budaya sehingga mampu bersaing dengan kecamatan yang sudah memiliki tingkat ekonominya yang sudah maju.

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Pemerintahan Fungsi Penunjang

#### 2.1.3.3.1 Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, dan 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan reses Anggota DPRD dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.46**  
**Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Lokasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dapil I					
	– Kec.Pandan	0	0	4	0	0
	– Kec.Sarudik	0	0	1	0	0
	– Kec.Tukka	0	0	3	0	0
2	Dapil II					
	– Kec.Badiri	0	0	2	0	0
	– Kec. Sukabangun	0	0	0	0	0
	– Kec. Sibabangun	0	0	2	0	0
	– Kec.Lumut	0	0	2	0	0
	– Kec. Pinangsori	0	0	1	0	0
3	Dapil III					
	– Kec.Sosorgadong	0	0	1	0	0
	– Kec.Barus	0	0	1	0	0
	– Kec. Barus Utara	0	0	0	0	0
	– Kec.Andam Dewi	0	0	0	0	0
	– Kec. Sirandorong	0	0	0	0	0
	– Kec. Manduamas	0	0	1	0	0
4	Dapil IV					
	– Kec.Sitahuis	0	0	0	0	0
	– Kec.Tapian Nauli	0	0	1	0	0
	– Kec.Kolang	0	0	0	0	0
	– Kec.Sorkam	0	0	3	0	0
	– Kec.Sorkam Barat	0	0	2	0	0
	– Kec.Pasaribu Tobing	0	0	1	0	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Humasy, dan Bagian Kessos. Bagian Umum Sekretariat Daerah melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program peningkatan disiplin aparatur. Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan. Bagian Humasy melaksanakan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerjasama Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bagian Hukum melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.47**  
**Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis Peraturan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perda tentang APBD	3	3	3	3	2
2.	Perda tentang Penerimaan Daerah	-	1	-	-	-
3.	Perda tentang Organisasi	-	1	-	-	-
4.	Perda tentang Penanaman Modal	-	-	-	-	-
5.	Perda tentang lain-lain	4	1	2	3	2
Jumlah		7	6	5	6	4

Sumber : Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Tengah, 2024

Bagian Ekonomi Pembangunan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah ada 20 Kecamatan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.48**  
**Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km2)	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorung	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>159</b>	<b>2.194,98</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

### 2.1.3.3.2 Pengawasan

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan dan mendukung kinerja pengawasan hingga tahun 2024 auditor berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.49**  
**Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah**

Sertikasi Auditor	Jumlah ASN / Tahun				2022	2023	2024
	2018	2019	2020	2021			
<b>Auditor Terampil</b>							
1. Auditor Pelaksana	1	1	1	-	-	-	-
2. Auditor Lanjutan	1	1	1	1	-	-	-
3. Auditor Penyelia							
<b>Auditor Ahli</b>							
1. Ahli Pertama	2	1	3	3	3	3	3
2. Ahli Muda	7	4	8	9	5	5	5
3. Ahli Madya	3	7	4	3	5	5	5
4. Ahli Utama	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	14	14	17	16	13	13	13

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Jumlah temuan dan rekomendasi BPK RI Tahun 2023 mengalami penurunan baik dari aspek temuan dan saran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2017 - 2023**

Tahun	Temuan	Saran	Rp ( TOTAL)	Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
				Jlh	Rp	Jlh	Rp
2017	13	41	Rp. 6.295.070.288,73	27	3.725.444.831,82	13	2.565.577.456,91
2018	16	91	Rp. 14.359.931.631,68	76	4.327.959.733,62	12	9.550.906.405
2019	28	146	Rp. 17.388.253.104,74	122	9.866.359.218,24	2	4.564.633.828,00
2020	9	40	Rp. 6.746.096.498,13	21	1.284.456.972,87	19	5.461.639.525,26
2021	13	45	Rp. 4.743.791.337,23	43	4.303.604.978,23	2	471.977.059,00
2022	11	22	Rp. 5.778.747.739,26	20	5.565.193.389,26	2	213.554.350
2023							

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024



Hasil pemeriksaan tahun 2023 belum diserahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2023.

**Tabel 2.51**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2017- 2023**

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1.	2017	6	8	7	1	-	-
2.	2018	18	31	22	5	4	9
3.	2019	15	25	15	10	-	-
4.	2020	-	-	-	-	-	-
5.	2021	6	8	5	3	-	3
6.	2022	28	28	26	2	-	2
7.	2023	Belum diserahkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

**Tabel 2.52**  
**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1	2017	77	78	68	1	9	10
2	2018	36	39	34	0	5	5
3	2019	36	50	0	14	36	36
4	2020	259	259	242	0	17	17
5.	2021	179	179	138	0	41	41
6.	2022	77	77	35	-	42	42
7.	2023	131	80	51	0	29	29

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Ket: SS = Sudah Selesai  
BS = Belum Selesai  
BT = Belum Tindak Lanjut  
TT = Tidak di Tindak Lanjuti

Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah disampaikan kepada masing-masing OPD.

#### **2.1.3.3.3 Perencanaan**

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemeliharaan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022-2024 diisi oleh pejabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

#### **1.1.3.3.4 Keuangan**

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping

dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB.

**Tabel 2. 53**  
**Capaian Kinerja Urusan Aset Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2021-2023**

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	139,83	221,135	310,121
2.	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat	Ha	779,33	785,708	786,195
3.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	18	28.14	39.45

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

#### 2.1.3.3.5 Kepegawaian

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 107 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 20 orang. Data tersebut tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.54**  
**Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan**  
**Tahun 2017-2023**

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan S-2	18	71	5	42	32	32	20
2	Pendidikan S-1	27	27	43	97	38	38	107
3	Pendidikan D-IV	-	2	-	-	-		
3	Pendidikan D-III	-	2	1	-	-		
4	STPDN	4	4	4	2	-		
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>141</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>127</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal). Sebagai pemenuhan kebutuhan PNS untuk melanjutkan pendidikannya namun tetap dapat menjalankan tugasnya

sebagai PNS maka BKPSDM telah menerbitkan ijin belajar. Adapun datanya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2023**

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	S-3	-	-	-	-	-	-	
2	S-2	3	61	5	42	32	27	13
3	S-1	25	22	43	97	38	83	105
4	D-IV	-	-	-	-	-		
5	D-III	-	2	1	-	-		
Jumlah		28	85	49	139	70	110	118

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tugas belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu melalui tugas belajar dengan ketentuan organisasi memerlukan kompetensi dengan syarat pendidikan yang ditempuh. Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan daerah melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pembiayaan tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Tempat pendidikan PNS untuk mengikuti tugas belajar adalah lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan lain (swasta) dengan akreditasi minimal B yang bekerjasama dengan pemerintah, kementerian atau lembaga non kementerian. Semenjak tahun 2021 IPDN bukakan lagi utusan daerah dan memasuki IPDN belum menjadi PNS.

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2023**

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	S-2	15	10	13	8	7	7	7
2	S-1	2	5	4	4	4	2	2
3	D-IV	4	6	1	1	1	2	-
4	D-III	-	-	-	1	1	-	-
Jumlah		21	21	18	14	13	11	9

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu

tertentusekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Satyalancana ini ditetapkan pada tahun 1959. Satyalancana ini dibentuk dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain. Pemberian Satyalancana ini difasilitasi oleh BKPSDM sebagai fasilitator ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu dengan mengajukan usulan ASN yang berhak diberikan penghargaan tersebut ke Kemendagri. Data dari tahun ke tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.57**  
**Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya**  
**Tahun 2017-2023**

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PNS yang berhak	354	100	151	-	-	51	178
2	Yang diusulkan	-	100	151	-	-	51	178
3	Realisasi	-	-	-	221	-	102	158

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024*

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan teladan bagi masyarakat, dengan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara. Apabila seorang PNS melakukan suatu bentuk pelanggaran (indisipliner), maka PNS tersebut akan diberikan sanksi kepegawaian. Sanksi kepegawaian merupakan sanksi administrasi yang berupa hukuman disiplin diperuntukkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS. Adapun beberapa jenis sanksi bagi PNS, diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Pemberian hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian terhadap seorang PNS, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan peralihan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman

disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Jenis kasus indisipliner yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari disiplin kehadiran hingga pidana korupsi dan pidana pencabulan. Adapun angka penanganan kasus indisipliner di wilayah kerja BKPSDM Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019-2023**

No	Kasus	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1	Ringan	-		-		-	-	-	
2	Sedang	-		-		-	-	-	
3	Berat	8	Diberhentikan Sementara	6	Diberhentikan	0	Tidak Ada	2	Diberhentikan

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024*

#### 2.1.3.3.6 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu perlu untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri ini diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sebagai seorang PNS. Untuk itu, diperlukanlah suatu pendidikan dan latihan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah jenis dan penggolongan pendidikan dan latihan PNS :

**a. Diklat Prajabatan**

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sekaligus untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan juga mengenai bidang tugas serta budaya organisasinya.

**b. Diklat Dalam Jabatan**

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan yang perlu ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, meliputi :

**1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)**

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Oleh karena itu diklat ini termasuk kedalam salah satu jenis diklat struktural, selain diklat prajabatan.

**2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional**

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari :

- Diklat fungsional keahlian yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
- Diklat fungsional ketrampilan yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

**3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis**

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan diklat yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis meliputi :

- Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- Diklat teknis substantif yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Selain jenis diklat di atas, dalam beberapa aplikasi kepegawaian terdapat jenis Diklat Formal dan Non Formal. Diklat formal sama seperti diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib bagi para calon dan pejabat fungsional tertentu, contoh : diklat auditor, diklat profesi guru, dll. Sedangkan Diklat Non Formal adalah diklat yang tidak wajib dilaksanakan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti : diklat pengelolaan keuangan, diklat manajemen sekolah, dan lain sebagainya. Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Diklat Prajabatan						
	Golongan II						
	- Reguler	-	-	-	-		-
	- Eks Honorer K 2	197	41	-	-		-
	Golongan II & III				243	161	
	- Umum Gol. III	-	158	-	-	-	-
- Umum Gol. II	-	53	-	-	-	-	
2	Diklat Struktural	-	-	-			
	Diklatpim Tk. II	-	-	-	-	-	1
	Diklatpim Tk. III	-	-	-	-	-	-
	Diklatpim Tk. IV	-	-	-	-	-	-
3	Diklat Fungsional	-	-	-			
4	- Diklat Fungsional Kepala SD	-	40	-	-	-	-
5	- Diklat Fungsional Kepala SMP	-	40	-	-	-	-
6	Diklat TOF	-	-	-	-	-	-
7	Diklat MOT	-	-	-	-	-	-
	Diklat Pengembangan Kompetensi ASN	80		-			
	- Diklat Bendahara ASN	-	30	-	-		

	- BinteK Anjab/ ABK	-	-	-	-	-	40
	- BinteK PAK bagi Pejabat Fungsional Disetarakan	-	-	-	-	-	80
	Diklat Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa	40		-			
	- Diklat Bendahara Desa	-	40	-	-		-
	- Diklat Kepemudaan Desa	-	40	-	-		-
	Jumlah	317	472	0	243	161	121

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

### 2.1.3.3.7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu tugas yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan ormas. Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.60**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	5	
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	4	2	

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah (*value added*) dan persaingan baik dalam negeri (*domestic*) maupun internasional dalam peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**Tabel 2.61**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 - 2024**

<b>Kelompok Komoditas</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah Makanan	483.409	539.537	555.147	572.571	620.842
Jumlah Bukan Makanan	379.463	363.732	354.869	375.507	377.291
Jumlah/Total	862.872	903.269	910.016	948.078	998.132

*Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2025 data diolah*

Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan pada Susenas Maret dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. Jumlah komoditas makanan sebanyak 174 komoditas. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya komoditas yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu terakhir untuk konsumsi makanan dan sebulan atau setahun terakhir untuk konsumsi bukan makanan. Ketersediaan pangan per kapita adalah ketersediaan pangan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan pangan per kapita bisa dalam bentuk kuantum maupun unsur gizi, yaitu kalori, protein, dan lemak.

##### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

###### a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Komitmen ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilakukan. Taat azas yang dimaksud disini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti proses pentahapan sesuai prosedur, dan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mengawal RTRW tersebut. Sesuai dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi penyusunan RTRW yaitu rencana peruntukan wilayah dengan peruntukan yang telah ada dilapangan. Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten

Tapanuli Tengah mengacu kepada Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 58.647ha yang kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **b. Luas wilayah produktif**

Wilayah budidaya merupakan suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Kawasan budidaya diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan asas penatagunaan tanah yaitu Lestari, Optimal dan Seimbang/serasi (LOS). Luas wilayah produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sangat luas, pada tahun 2022 luas areal tanaman perkebunan seluas 16.836,12ha, luas areal tanaman padi dan palawija seluas 28.730ha serta luas areal budidaya perikanan tahun 2022 seluas 11,02ha.

### **2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia**

#### **a. Investasi**

Dalam mendukung perkembangan iklim berinvestasi, Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk menjamin maupun mempermudah proses izin administrasi hingga pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

#### **b. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi**

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban nasional (Kantrantibnas) dan pencegahan tindak kriminal diwujudkan melalui peningkatan kerjasama aparat dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah; serta pengawasan pengendalian dan evaluasi Perda. Selanjutnya peningkatan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui pengendalian keamanan lingkungan; pertemuan berkala Ormas, Orsospol, OKP dan LSM serta terselenggaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD**

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Isu Strategis**

Perekonomian merupakan fokus pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah bergantung pada komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dalam pemanfaatannya memerhatikan aspek lingkungan. Tema pembangunan di tahun 2025 adalah Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan serta program pembangunan yang memiliki kaitan erat dengan prioritas pembangunan daerah, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan, beberapa isu strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur;  
Pemerataan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM. Pemerataan infrastruktur hingga ke desa tertinggal diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menunjang perekonomian, pengurangan angka kemiskinan serta Konektivitas inter dan intra wilayah.
2. Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM);  
Kualitas SDM menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya SDM yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan

serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja.

3. Pengembangan Ekonomi;

Melalui potensi unggulan sumber daya daerah, pengembangan inovasi, investasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalisme aparat dalam pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sistem pemerintahan yang bersih dihasilkan dari transparansi dalam menjalankan pemerintahan melalui pelaksanaan e-government.

5. Penanggulangan Kemiskinan;

Kemiskinan dominan dipengaruhi pada dimensi akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, ketenagakerjaan, kesehatan & Pendidikan, penanganan kemiskinan dengan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam upaya penguatan dan pengembangan usaha dan industri padat karya, penguatan sektor riil, penguatan UMKM dan menjaga ketahanan pangan.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui permasalahan pembangunan berdasarkan bidang urusan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Tengah, dijelaskan pada tabel berikut.

#### 2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### a. Pendidikan

- 1) Masih banyaknya ruang kelas kondisi rusak. Persentase ruang kelas kondisi rusak untuk SD sederajat diatas 50 persen, SMP sederajat sebesar 40 persen dan SMA/SMK sederajat sebesar 35 persen;
- 2) Penempatan guru belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara pedesaan dan perkotaan;
- 3) Belum optimalnya partisipasi pendidikan anak usia dini pada usia 0 – 6 tahun serta jumlah lembaga PAUD yang telah terakreditasi dan dimuat dalam Dapodik PAUD dan Dikmas;
- 4) Belum optimalnya capaian APM di jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupun SMP sederajat. APM SD/MI sebesar 96,51persen dan APM SMP/MTs sebesar 90,20persen.

##### b. Kesehatan

- 1) Masih relative tingginya angka kematian Ibu melahirkan dan bayi lahir;
- 2) Masih adanya kasus stunting;

- 3) Masih rendahnya jumlah cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);
- 4) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular;
- 5) Belum tercapainya cakupan warga masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (*Universital Health Coverage/UHC*);
- 6) Belum optimalnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar,
- 7) Ketersediaan tenaga medis sebagai tenaga kesehatan fasilitas rujukan belum memadai.

**c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Belum semua jalan diwilayah Kabupaten Tapanuli Tengah kondisinya baik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta adanya wilayah yang rentan terhadap bencana banjir;
- 3) Belum memadainya ketersediaan gedung perkantoran Bupati Tapanuli Tengah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan cepat;
- 4) Belum semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah terlayani air bersih serta masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi;
- 5) Belum semua kawasan tersedia Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan RDTR untuk mendukung RTRW;
- 6) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan pelaksanaannya.

**d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- 1) Belum optimalnya fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman, antara lain penyediaan air bersih yang belum memadai dan merata, penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum tertangani secara terpadu serta perlunya perbaikan kualitas jalan lingkungan untuk mendukung mobilitas penduduk;
- 2) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal;
- 3) Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

**e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Masih adanya pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat;
- 2) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 3) Penyakit sosial masyarakat;

- 4) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran di setiap wilayah.

**f. Sosial**

- 1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum terintegrasi dengan data pusat;
- 2) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih belum optimalnya persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan social;
- 4) Masih minimnya sarana sosial pemerintah (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi PMKS.

**2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**a. Tenaga Kerja**

- 1) Kurangnya minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan;
- 2) Rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan melaksanakan wajib lapor;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi;
- 4) Terbatasnya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja serta terbatasnya informasi tentang lowongan kerja bagi para pencari kerja.

**b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam masyarakat;
- 3) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender;
- 4) Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak seperti Fasilitasi Hidup Sehat Anak, Fasilitasi Sekolah Ramah Anak , Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak, Fasilitasi Taman Pustaka Anak , Fasilitasi Rumah Aman Anak

**c. Pangan**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
- 2) Masih belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- 3) Perlunya diversifikasi pangan sehingga terwujudnya ketersediaan pangan;
- 4) Perlunya peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian dan Petani;
- 5) Alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya;

6) Perlunya pemanfaatan lahan pekarangan untuk cadangan gizi keluarga.

**d. Pertanian**

- 1) Masih banyaknya luas lahan yang belum bersertifikat;
- 2) Lambatnya pengadministrasian pertanahan di tingkat desa;
- 3) Kendala dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

**e. Lingkungan Hidup**

- 1) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;
- 2) Ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih rendah;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan persampahan terutama yang dapat menjangkau kecamatan.

**f. Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- 2) Belum optimalnya sarana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya belum tersedianya mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil;
- 3) Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk gedung kantor belum memadai.

**g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Belum optimalnya pembinaan aparat desa;
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- 3) Belum optimalnya kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa;
- 4) Belum memadainya SDM aparat desa dalam menjalankan tugas -tugas pemerintahan desa;
- 5) Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

**h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Masih tingginya angka Wanita Usia Subur (WUS) yang tidak ingin hamil dan tidak ingin memakai alat kontrasepsi (*Unmet need*);
- 2) Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB;
- 3) Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Masih tingginya pernikahan usia dini;
- 5) Belum memadainya sarana dan prasarana termasuk gedung kantor untuk melaksanakan pelayanan KB.

**i. Perhubungan**

- 1) Belum meratanya penyediaan rambu-rambu lalu lintas dikecamatan;



- 2) Peningkatan moda transportasi darat, laut dan udara;
- 3) Belum adanya alat uji kendaraan bermotor;
- 4) Belum semua daerah dapat dilalui moda transportasi angkutan umum;
- 5) Minimnya moda transportasi laut menuju daerah/objek wisata bahari;
- 6) Perlunya perpanjangan runway bandara Dr. F.L Tobing agar bisa didarati pesawat berbadan lebar;
- 7) Belum adanya prasarana lalu lintas berbasis IT.

**j. Komunikasi dan Informatika**

- 1) Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan public;
- 2) Sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi;
- 3) Masih terdapat area yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi;
- 4) Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika untuk mendukung penerapan e-government.

**k. Koperasi dan UMKM**

- 1) Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia bidang koperasi dan UMKM dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan inovasi pengembangan produk;
- 2) Belum optimalnya pengembangan permodalan koperasi dan UMKM;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan pelaku UMKM;
- 4) Masih rendahnya Daya saing produk UMKM dibanding produk daerah lain.

**l. Penanaman Modal**

- 1) Terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 2) Belum optimalnya penyajian data dan potensi investasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) masih belum mencakup semua layanan perijinan.

**m. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Belum optimalnya penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan;
- 2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 3) Prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional perlu ditingkatkan;
- 4) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana beberapa cabang olahraga;
- 5) Kurangnya pelatihan dan ketrampilan teknis pembinaan pemuda dan keolahragaan;
- 6) Kurangnya pelaksanaan kegiatan baik kepemudaan maupun keolahragaan.

**n. Statistik**



- 1) Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan;
- 2) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.

**o. Persandian**

- 1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

**p. Kebudayaan**

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- 2) Belum optimalnya promosi seni dan budaya Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3) Terbatasnya fasilitasi dan pemeliharaan cagar budaya;
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya.

**q. Perpustakaan**

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung urusan Perpustakaan;
- 2) Belum adanya SDM Pengelola Perpustakaan maupun pustakawan;
- 3) Minimnya jumlah koleksi buku di perpustakaan;
- 4) Belum tersedianya gedung perpustakaan daerah sebagai sumber informasi bagi masyarakat;
- 5) Belum tumbuh dan berkembangnya lembaga perpustakaan di tingkat desa/kelurahan, seperti perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat dan perpustakaan di rumah-rumah ibadah;
- 6) Belum terlaksananya promosi tentang keberadaan perpustakaan.

**r. Kearsipan**

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung urusan Kearsipan;
- 2) Belum adanya SDM Pengelola kearsipan atau arsiparis;
- 3) Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk informatika/digital;
- 4) Belum tersedianya gedung/ruangan khusus untuk menyimpan arsip;
- 5) Belum dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menyimpan dan menampilkan arsip.

### **2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

**a. Kelautan dan Perikanan**

- 1) Menurunnya jumlah produksi ikan tangkap dan ikan budidaya air tawar;
- 2) Semakin banyaknya jumlah terumbu karang yang rusak;
- 3) Ketersediaan industri processing pasca tangkap di kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kurangnya diverifikasi pengolahan ikan pasca tangkap;
- 5) Kurangnya kesiapan masyarakat nelayan dalam menjalankan regulasi

pemerintah pusat.

**b. Pariwisata**

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah;
- 2) Belum optimalnya promosi kegiatan kepariwisataan dan potensi objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3) Belum optimalnya Penataan / pengembangan destinasi pariwisata;
- 4) Kurangnya Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata;
- 5) Kurangnya dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata sebagai sektor unggulan daerah;
- 6) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di daerah-daerah objek wisata.

**c. Pertanian**

- 1) Luas areal tanaman pangan khususnya untuk komoditi padi mengalami penurunan;
- 2) Belum optimalnya Proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga produk pertanian;
- 3) Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan, dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 4) Meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi perkebunan;
- 5) Ketersediaan benih, pupuk, pestisida sesuai jumlah dan harga yang terjangkau oleh petani;
- 6) Ketersediaan alat mesin pertanian (Alsintan) mendukung modernisasi pertanian masih sangat kurang di tingkat petani.

**d. Perdagangan**

- 1) Perlunya revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan;
- 2) Peningkatan daya saing produk;
- 3) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;
- 4) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang.

**e. Perindustrian**

- 1) Penguasaan teknologi dan inovasi produk yang rendah;
- 2) Kualitas dan daya saing produk yang masih rendah;
- 3) Perlunya pengembangan industri kreatif;
- 4) Perlunya pengembangan industri kecil dan menengah.

**f. Transmigrasi**

- 1) Kurangnya kegiatan dari pemerintah pusat yang bersifat padat karya;
- 2) Belum adanya kelanjutan program nasional bagi daerah eks transmigrasi dalam rangka mendukung keberlanjutan pengelolaan daerah eks transmigrasi.

**2.3.2.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan**



## **Pemerintahan**

### **a. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah;
- 2) Belum optimalnya implementasi proses penyusunan perencanaan secara partisipatif dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.

### **b. Pengawasan**

- 1) Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah);
- 3) Masih kurangnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD;
- 4) Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

### **c. Keuangan**

- 1) Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Terbatasnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

### **d. Kepegawaian**

- 1) Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- 2) Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

### **e. Legislasi Daerah**

- 1) Belum optimalnya fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD sebagai lembaga legislasi daerah.

### **f. Sekretariat Daerah**

- 1) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung perkantoran untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 4) Masih rendahnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- 5) Belum seluruh manajemen pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik, baik melalui e-government maupun e-office;

- 6) Belum seluruh prosedur pelayanan disusun dalam bentuk *Standar Operasional Prosedur* (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) Belum dilaksanakannya evaluasi/survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 8) Perlunya peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 perlu memperhatikan kondisi perekonomian ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global, nasional dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospeknya kedepan, yang selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal pada RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Global**

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2026. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geo ekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Selain itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tetap 2,8 persen pada 2025, tidak berubah dari tahun sebelumnya, serta memperkirakan ekonomi dunia akan meningkat 2,9 persen pada 2026. Sedangkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen pada 2025 dan 2026. Proyeksi tersebut, diperkuat dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono meramal pertumbuhan ekonomi global akan melambat di periode 2025-2026. Proyeksinya, makro ekonomi dunia berada di level 2,7 persen. Perkembangan ekonomi global 2024-2025 tetap tidak pasti dan menentu, dengan perkembangan lambat. Pertumbuhan ekonomi global tetap pada 2,6 persen di tahun 2024, sebelum kemudian naik 2,7 persen di tahun 2025-2026.

Selanjutnya, Bank Indonesia merangkum terdapat lima tantangan perekonomian yang patut diwaspadai:

1. ***Slower & divergent growth*** .Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, bahkan prospek ekonomi pada 2026 dan 2025 akan meredup, salah satunya Eropa dan China. Namun perekonomian Amerika Serikat diperkirakan membaik,

pun dengan Indonesia dan India yang juga diperkirakan membaik. BI memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,8% hingga 5,6% pada 2025, dan 4,9% hingga 5,7% pada 2026.

2. ***Reemergence of inflation pressure.*** Penurunan inflasi global akan melambat, bahkan berisiko naik pada 2026. Hal ini terjadi karena adanya gangguan rantai pasok global.
3. **Ketidakpastian suku bunga *The Fed*.** Arah kebijakan bunga *The Fed* diperkirakan bakal menurun, menjadi lebih rendah, namun *yield Ustreasury* akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 5% di 2026.
4. **Penguatan mata uang dolar alias *strong dollar*.** Indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kondisi tersebut akan memukul stabilitas nilai tukar, sehingga menyebabkan depresiasi nilai tukar diseluruh dunia termasuk nilai tukar rupiah.
5. **Anggapan investor asing lebih tertarik ke Amerika Serikat.** Persepsi tersebut akan menyebabkan modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke Asiantaran tingginya suku bunga dan kuatnya dolar AS.

Ditengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dinegara-negara berkembang. Disisi lain, isu ageing population dinegara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

### **3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional**

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat(AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Tingkat suku bunga global yang masih bertahan dilevel tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan

fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan pertumbuhannya yang melambat. Ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik.

World Bank atau Bank Dunia memperkirakan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dikisaran rata-rata 5,1% pada tahun ini hingga 2026. Selanjutnya, Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik pada 2025 dan 2026 meski ditengah risiko redupnya ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik kerentang 4,8%-5,6 persen pada 2025 dan 4,9-5,7 persen pada 2026.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif hingga tahun 2026.

### **3.1.3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**

Kondisi ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,67% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 (year-on-year). Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan IV tahun 2024), ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar 0,99% (quarter-on-quarter). Secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 diprediksi akan semakin kuat, dengan perkiraan mencapai 4,9-5,7% (yoy).

Beberapa poin penting terkait ekonomi Sumatera Utara tahun 2025:

- **Pertumbuhan Triwulan I:**

Pertumbuhan 4,67% (yoy) menunjukkan adanya ekspansi ekonomi, namun kontraksi (q-to-q) mengindikasikan adanya fluktuasi antar triwulan.

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,67 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,13 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,69 persen.

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,99 persen (q-to-q). Dari sisi produksi,

kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,62 persen.

- Inflasi

Pada Mei 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,29. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 109,26, sedangkan inflasi y-on-y yang terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 0,41 persen dengan IHK sebesar 108,49.

Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 0,97 persen

- Ekspor dan Impor

Ekspor Sumatera Utara pada April 2025 mencapai US\$ 869,97 Juta dan Impor Sumatera Utara pada April 2025 mencapai US\$ 443,33 Juta.

- Prediksi Pertumbuhan

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 akan mencapai 4,9-5,7% (yoy).

- Nilai Tukat Petani (NTP)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara didukung oleh berbagai sektor, termasuk perkebunan, industri, dan pariwisata.

Pada Mei 2025, NTP Provinsi Sumatera Utara (2018=100) tercatat sebesar 139,53 atau turun 1,17 persen dibandingkan dengan NTP April 2025, yaitu sebesar 141,18.

Penurunan NTP Mei 2025 disebabkan oleh turunnya NTP dua subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 5,76 persen dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,96 persen. Sementara itu, NTP tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan, yaitu NTP subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,56 persen, NTP subsektor Peternakan sebesar 1,01 persen, dan NTP subsektor Perikanan sebesar 0,27 persen.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2025 sebesar 140,20 atau turun sebesar 1,61 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024**

Lapangan Usaha	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.95	3.87	5.03	3.04	3.73
b. Pertambangan dan Penggalian	-2.31	1.92	2.62	3.53	4.03
c. Industri Pengolahan	-0.84	1.43	1.98	3.42	4.65
d. Pengadaan Listrik dan Gas	3.16	4.93	4.81	2.17	2.66
e. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan limbah.	3.79	3.62	2.17	2.87	2.57
f. Kontruksi	-3.42	2.18	3.03	6.4	6.52
g. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-1.87	3.62	6.57	5.8	4.44
h. Transportasi dan Pergudangan	-12.77	-3.63	12.96	13.12	6.33
i. Akomodasi dan Makan Minum	-9.26	-0.81	7.26	10.23	11.98
j. Informasi dan Komunikasi	6.17	6.51	7.6	7.81	7.41
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.29	4.46	3.81	5.5	3.87
l. Real Estate	1.57	2.5	4.53	3.19	5.41
m. n. Jasa Perusahaan	-4.71	-0.14	8.78	6.69	5.12
o. Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	0.37	2.08	-0.73	1.92	6.08
p. Jasa pendidikan	1.52	3.05	5.14	7.38	5.66
q. Jasa Kegiatan sosial, dan	-2.46	0.25	4.83	6.44	5.12
r. s.t.u. Jasa Lainnya	-3.74	1.43	8.72	9.47	6.54

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 11,98 %. Padahal sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 13,12 % dan pada Tahun 2024 laju pertumbuhannya sebesar 6,33 % mengalami penurunan sebesar 6,79 %.

Untuk sektor ekonomi Informasi dan Komunikasi merupakan sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 7,41 % walaupun mengalami penurunan laju pertumbuhan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 7,81 %.

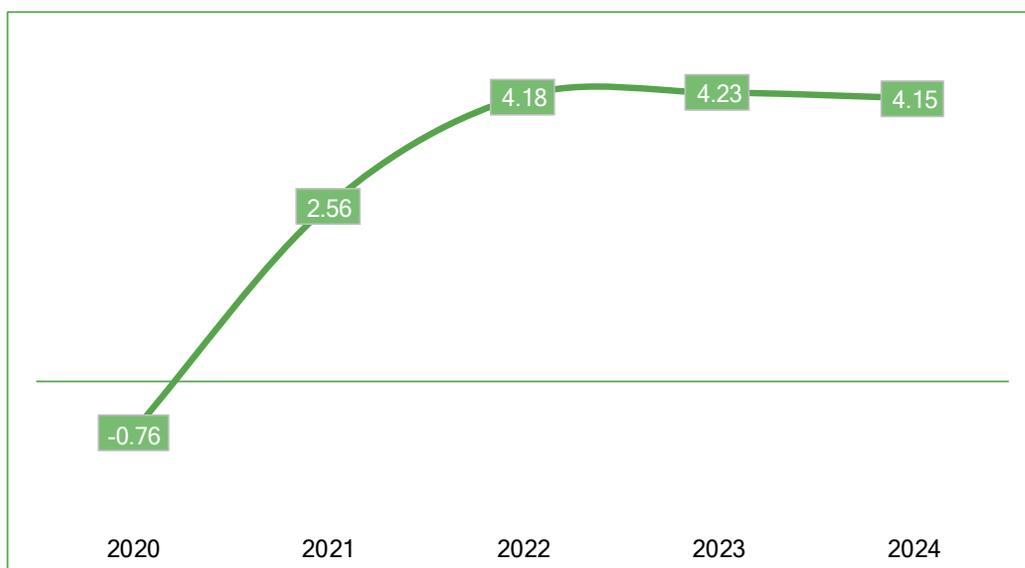
Sedangkan sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan terendah yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan limbah yaitu sebesar 2,57 %.

### 3.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah

#### 3.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang menggambarkan peningkatan ekonomi daerah diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen akibat krisis global pandemi Covid-19, namun secara perlahan kembali pulih. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,56 % dan pada Tahun 2022 sebesar 4,18 % hingga tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 4,23 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemulihan ekonomi sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat meningkatkan pertumbuhannya secara bertahap. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,15 persen. Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5,72 % lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 4,67. Secara spesifik, laju

pertumbuhan ekonomi menurut sektor dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 - 2024**

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06	3,21	2,61
Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03	5,18	0,53
Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87	4,04	4,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74	1,89	5,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,54	7,74	3,71	4,40
Konstruksi	-5,12	-	3,01	5,21	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91	5,59	5,11
Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77	12,64	2,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	-	7,85	6,90
Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48	5,06	4,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36	4,47	4,29
Real Estat	1,29	0,92	5,70	5,45	3,61
Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19	-	7,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02	3,48	7,99
Jasa Pendidikan	0,04	4,46	-	6,75	5,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92	6,41	6,00
Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33	7,82	8,59
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>-0,76</b>	<b>2,56</b>	<b>4,18</b>	<b>4,23</b>	<b>4,15</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal pada Sektor Jasa Lainnya sebesar 8,59 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,99 persen, dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki prospek ke depannya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

#### 3.1.4.2. Distribusi Perekonomian

Distribusi Perekonomian dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari masing-masing lapangan usaha. Dengan melihat distribusi perekonomian, maka akan diperoleh gambaran sektor mana yang paling berperan bagi perekonomian daerah. Distribusi perekonomian

menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Distribusi Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 – 2024**

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,18	46,20	46,76	46,80	47,02
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24
Industri Pengolahan	11,18	11,61	11,60	11,25	11,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,56	0,56	0,53	0,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Konstruksi	11,55	11,74	11,70	12,00	12,13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,29	12,50	12,57	12,55	12,42
Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,18	2,41	2,74	2,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,33	1,33	1,32	1,33
Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,66	0,65	0,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	1,03	0,99	0,96	0,9
Real Estat	2,06	2,03	1,98	1,94	1,86
Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,50	8,06	7,36	7,20	7,26
Jasa Pendidikan	0,98	0,98	0,95	0,93	0,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33
Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah*

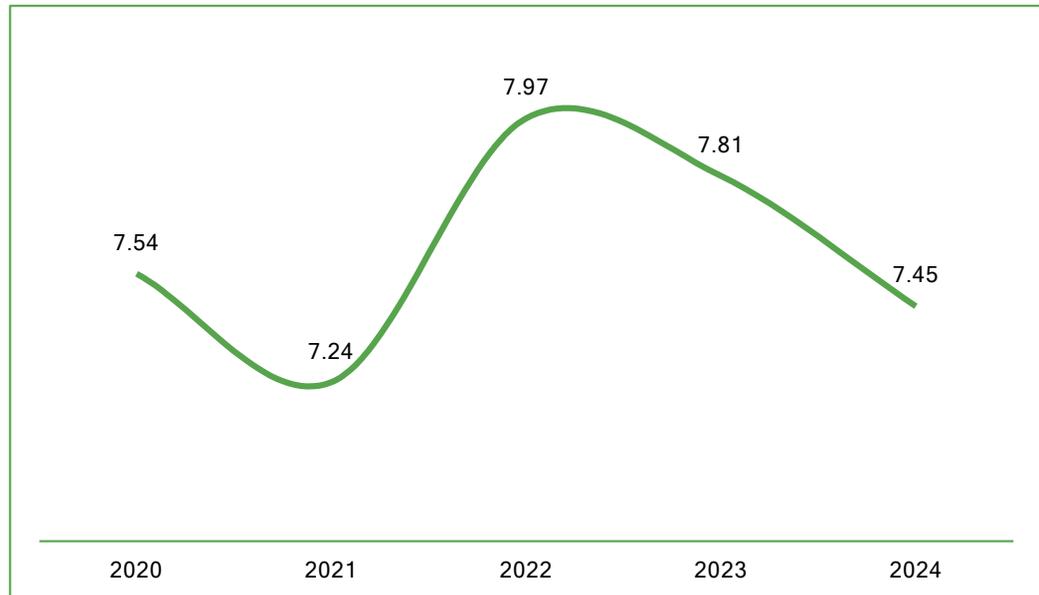
Pada tahun 2024, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana pada tahun 2024 kontribusi sektor ini sebesar 47,02 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen, Sektor Konstruksi sebesar 12,13 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penopang perekonomian daerah. Sektor tersebut harus terus ditingkatkan karena berperan penting bagi perekonomian daerah

#### **3.1.4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja/sedang mencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang menggambarkan kondisi pengangguran di suatu daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja (15-64 tahun) yang tidak/belum/sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020-2024**



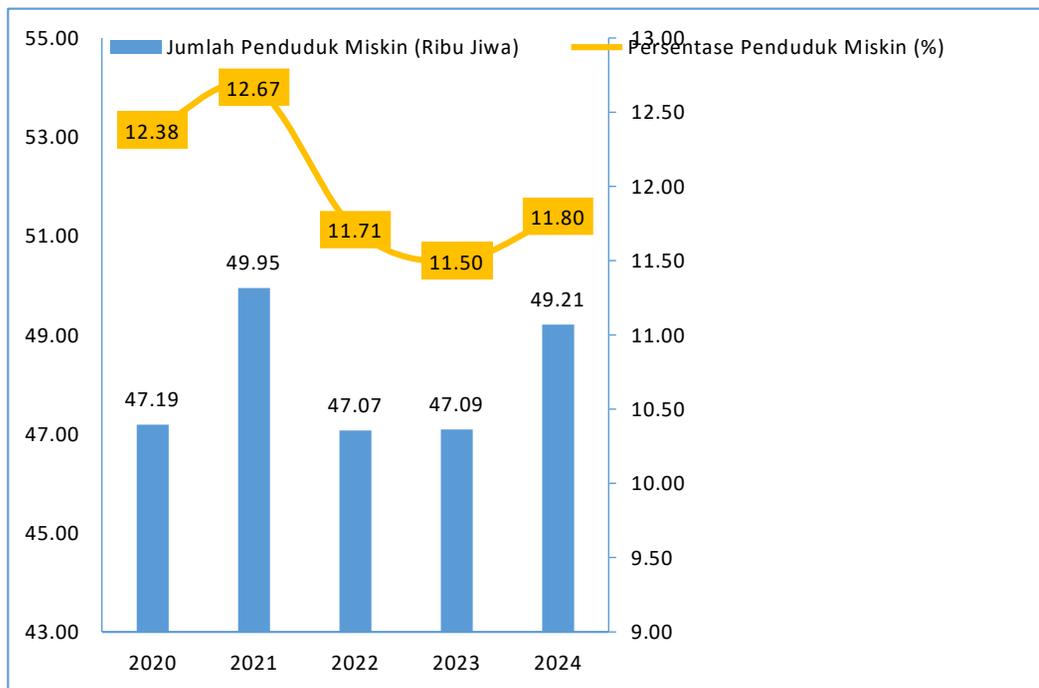
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung meningkat dari 7,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,97 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 7,45 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun hal ini masih menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja.

#### **3.1.4.4. Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.3**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

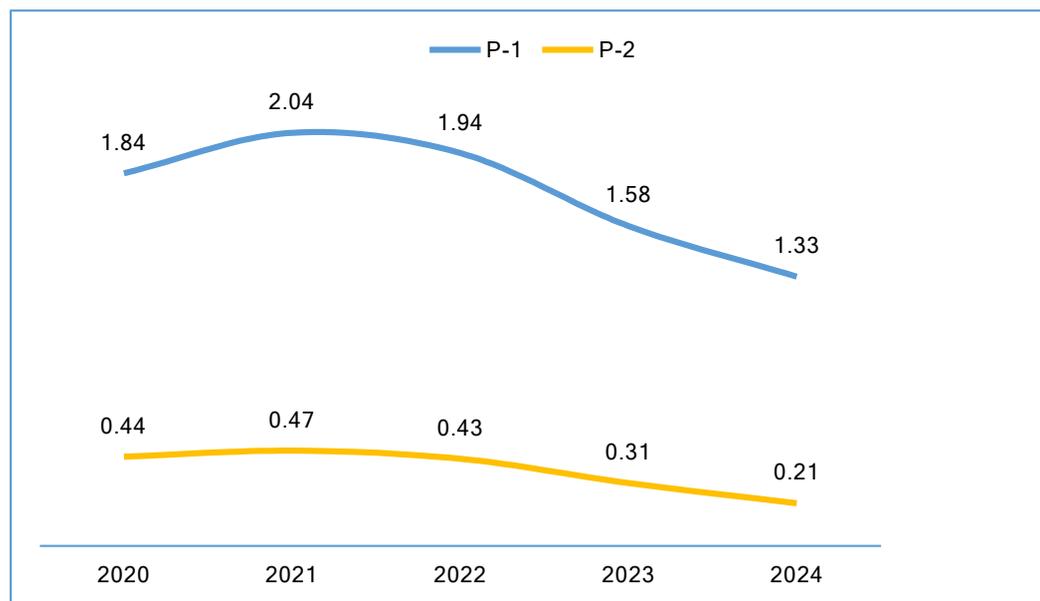
Persentase penduduk miskin relatif menurun dari 12,38 persen pada tahun 2020 menjadi 11,80 persen pada tahun 2024. Namun, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat dari 47,19 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 49,21 ribu jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan secara persentase penduduk miskin pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sebaliknya jumlah penduduk miskin lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah juga meningkat sehingga persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) atau *Poverty Gap Index* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P-1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P-1

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) atau *Poverty Severity Index* memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P-2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.4**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

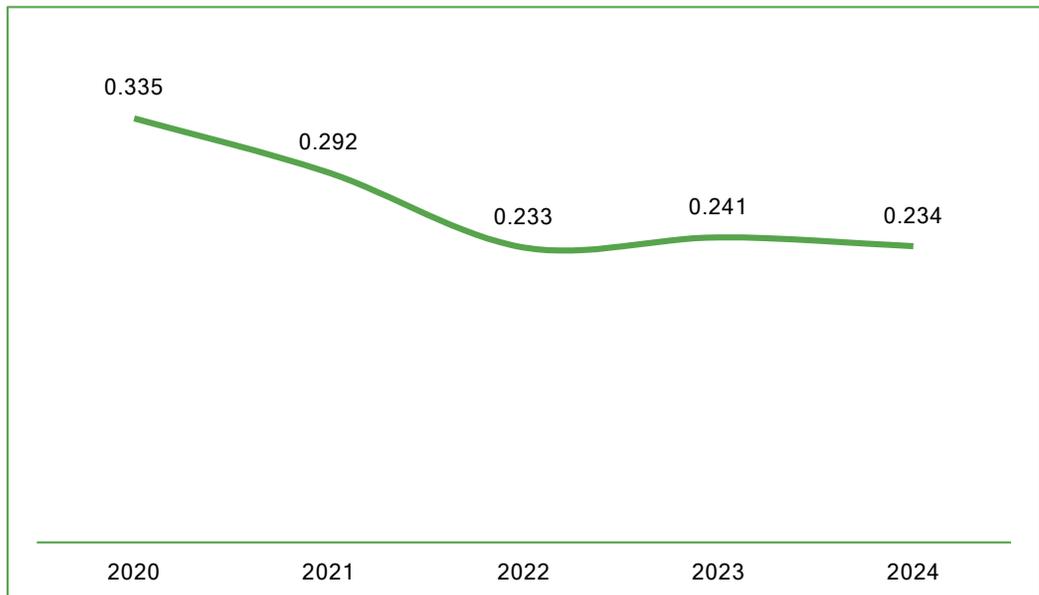
Kedua indeks mengalami pergerakan yang relatif sama, di mana mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) meningkat dari 1,84 persen pada tahun 2020 menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 1,33 persen, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami peningkatan dari 0,44 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik dalam mengatasi permasalahan, namun pemerintah tetap harus terus mengurangi penduduk miskin melalui identifikasi permasalahan kemiskinan dan bantuan yang tepat.

#### 3.1.4.5. Rasio Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk

mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan/kekayaan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan absolut (satu orang menguasai semua pendapatan/kekayaan)

**Gambar 3.5**  
**Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari 0,335 poin pada tahun 2020 menjadi 0,234 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin rendah. Namun, perlu diperhatikan apakah indeks yang semakin menurun ini menunjukkan semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendekati masyarakat yang berpendapatan rendah atau sebaliknya.

#### **3.1.4.6. Inflasi**

Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2020-2024 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43

persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Pada Tahun 2024 laju inflasi Kota Sibolga sebesar 2,94 persen mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kenaikan laju inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar yang mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

**Gambar 3.6**  
**Laju Inflasi Tahun 2020-2024**



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata berada di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Peningkatan inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global.

### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

#### 3.1.4.1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial antara lain :

1. Pengendalian inflasi
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan/ mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis
3. Mendorong investasi yang berwawasan lingkungan
4. Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti

pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.

5. Peningkatan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
6. Penghapusan kemiskinan ekstrim
7. Penurunan stunting
8. Peningkatan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan
9. Peningkatan kondisi infrastruktur; dan
10. Peningkatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

#### 3.1.4.2. Prospek Perekonomian Daerah

Secara umum, Prospek Perekonomian Daerah Tapanuli Tengah tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Kemudian pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan

Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapanuli Tengah. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan pencapaian target indikator Kinerja makro tahun 2026;

**Tabel 3.4**

**Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	Target
			2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5
2	Laju Inflasi	%	2,94	1,00-3,00	1,00-3,00
3	Indeks Gini	Point	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237

No.	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	Target
			2024	2025	2026
4	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	indeks	73,34	74,55 – 76,76	74,91-77,16
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,45	7,65-7,49	7,52-7,4
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99
7	PDRB Perkapita	Rp	34,62	48,76	56,83

Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat pada tahun 2025 dan 2026. Hal ini ditandai dari Sektor penyumbang PDRB tertinggi yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi serta industri pengolahan. Laju inflasi diharapkan menurun pada tahun 2025 dan 2026. Hal ini diharapkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum melambat dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Indeks gini diharapkan semakin menujut pemerataan pendapatan dan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat. Indek Pembangunan Manusia diharapkan semakin baik kualitas kehidupan meliputi kesehatan (yang tercermin dari angka harapan hidup), pendidikan (yang diukur dari tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (yang dilihat dari pendapatan per kapita). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator penting untuk memahami kondisi pasar kerja dan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan tahun 2025 dan 2026 semakin banyak angkatan kerja yang terserap oleh pasar kerja. Tingkat kemiskinan diharapkan semakin menurun dan jumlah orang yang hidup dalam kondisi miskin berkurang. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang memenuhi kriteria kemiskinan, seperti pengeluaran di bawah garis kemiskinan, semakin kecil. PDRB Perkapita diharapkan semakin meningkat dimana setiap penduduk memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini bisa berarti pendapatan mereka meningkat, atau nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh mereka juga meningkat. Sehingga variable peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru semakin digali dan diperbaiki kembali.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil.
6. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya.
7. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026**

KOD E	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>84.747.554.155,00</b>	<b>84.670.220.683,00</b>	<b>82.805.789.000,00</b>	<b>82.805.789.000,00</b>	<b>83.633.846.890,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	26.253.087.000,00	26.278.087.000,00	26.957.938.000,00	26.957.938.000,00	27.227.517.380,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.977.500.000,00	3.477.500.000,00	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	2.110.900.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	10.427.213.155,00	10.253.065.683,00	10.790.167.000,00	10.790.167.000,00	10.898.068.670,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.089.754.000,00	44.661.568.000,00	42.967.684.000,00	42.967.684.000,00	43.397.360.840,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.070.200.167.000,00</b>	<b>1.087.175.368.000,00</b>	<b>1.063.185.553.980,00</b>	<b>1.073.520.362.993,00</b>	<b>1.074.627.094.990,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.025.099.639.000,00	1.035.781.353.000,00	1.003.785.554.000,00	1.021.555.515.333,00	1.020.374.140.777,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.100.528.000,00	51.394.015.000,00	59.399.999.980,00	51.964.847.660,00	54.252.954.213,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.270.279.000,00</b>	<b>15.270.279.000,00</b>	<b>23.345.588.108,00</b>	<b>17.962.048.702,00</b>	<b>18.859.305.270,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	270.279.000,00	270.279.000,00		180.186.000,00	150.155.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	23.345.588.108,00	17.781.862.702,00	18.709.150.270,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.170.218.000.155,00</b>	<b>1.187.115.867.683,00</b>	<b>1.169.336.931.088,00</b>	<b>1.174.288.200.695,00</b>	<b>1.177.120.247.150,00</b>

Pendapatan Daerah Tahun 2026 diperkirakan meningkat sebesar Rp.4.951.269.607,00 dari kondisi Tahun 2025 sebesar Rp 1.169.336.931.088,00 menjadi Rp 1.174.288 200.695,00. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah tetap sebesar Rp. 82.805.789.000,00, selanjutnya pendapatan transfer daerah meningkat sebesar Rp. 10.334.809.013,00 dari kondisi tahun 2025 sebesar Rp. 1.063.185.553.980,00 menjadi Rp. 1.073.520.362.993,00 pada tahun 2026. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.5.383.539.407,00 dari kondisi tahun 2025 sebesar Rp. 23.345.588.109,00 menjadi Rp. 17.962.048.,00 pada tahun 2026.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah secara umum antara lain :

1. Belanja wajib dan mengikat.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
4. Belanja peningkatan pertumbuhan ekonomi
5. Belanja pemilukada, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting.
6. Belanja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;.
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
10. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi, Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.

11. Mendukung program/kegiatan strategis dan prioritas yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026**

KOD E	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>868.549.359.169,00</b>	<b>873.031.030.872,00</b>	<b>880.055.685.225,50</b>	<b>873.878.691.753,00</b>	<b>875.655.135.948,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	489.918.804.267,00	479.778.913.139,00	529.437.964.880,00	499.711.894.095,00	502.976.257.371,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.865.110.003,00	357.561.977.531,00	332.365.551.726,50	351.597.546.420,00	347.175.025.225,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.376.113.711,00	3.787.528.202,00	3.108.426.269,00	3.757.356.060,00	3.551.103.510,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.131.331.188,00	31.644.612.000,00	15.143.742.350,00	17.973.228.512,00	21.587.194.287,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.258.000.000,00	258.000.000,00		838.666.666,00	365.555.555,00
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>133.542.977.585,00</b>	<b>103.560.344.203,00</b>	<b>115.044.098.690,40</b>	<b>116.113.741.217,00</b>	<b>110.783.861.368,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	2.100.000.000,00	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.794.171.063,00	33.811.537.681,00	31.596.618.570,40	43.067.442.438,00	36.158.532.896,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.169.289.313,00	35.169.289.313,00	58.354.703.485,00	42.897.760.703,00	45.473.917.833,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.620.389.497,00	30.620.389.497,00	18.954.299.384,00	26.163.027.185,00	25.245.905.355,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.959.127.712,00	3.959.127.712,00	3.838.477.251,00	3.918.910.891,00	3.905.505.284,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			200.000.000,00	66.600.000,00	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.390.753.684,00</b>	<b>3.390.753.684,00</b>	<b>7.205.392.544,10</b>	<b>4.662.299.970,00</b>	<b>5.086.148.732,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.390.753.684,00	3.390.753.684,00	7.205.392.544,10	4.662.299.970,00	5.086.148.732,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>188.890.248.000,00</b>	<b>207.341.892.800,00</b>	<b>204.429.234.000,00</b>	<b>200.220.458.266,00</b>	<b>203.997.195.022,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.023.058.700,00	2.975.558.700,00	2.904.793.800,00	2.967.803.733,00	2.949.385.411,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	185.867.189.300,00	204.366.334.100,00	201.524.440.200,00	197.252.654.533,00	201.047.809.611,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.194.373.338.438,00</b>	<b>1.187.324.021.559,00</b>	<b>1.206.734.410.460,00</b>	<b>1.194.875.191.206,00</b>	<b>1.195.522.341.070,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(24.155.338.283,00)</b>	<b>(208.153.876,00)</b>	<b>(37.397.479.372,00)</b>	<b>(20.586.990.511,00)</b>	<b>(18.402.093.920,00)</b>

Pada tabel diatas belanja juga mengalami penurunan sebesar Rp. 11.859.219.254,00 yang terdiri dari belanja Operasi menurun sebesar Rp. 6.176.993.472,00, sedangkan Belanja Modal meningkat sebesar Rp. 1.069.642.526,60.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Pada APBD Induk TA. 2026 diasumsikan sebesar Rp 31.324.441.832,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025. Hal ini menurun sebesar Rp.16.725.883.6644,00 dari kondisi Tahun 2025 sebesar Rp.48.050.325.496,00, sedangkan asumsi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2026 meningkat sebesar Rp 84.605.197,00 menjadi Rp.10.737.451.321,00, dari kondisi Tahun 2025 sebesar Rp 10.652.846.124,00. Adapun Rincian Pembiayaan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026**

KOD E	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.062.000.000,00</b>	<b>10.861.000.000,00</b>	<b>48.050.325.496,00</b>	<b>31.324.441.832,00</b>	<b>29.083.141.775,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	35.062.000.000,00	10.861.000.000,00	48.050.325.496,00	31.324.441.832,00	29.083.141.775,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>35.062.000.000,00</b>	<b>10.861.000.000,00</b>	<b>48.050.325.496,00</b>	<b>31.324.441.832,00</b>	<b>29.083.141.775,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.906.661.717,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.737.451.321,00</b>	<b>10.681.047.855,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.804.762.741,00			1.268.254.247,00	422.751.415,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	7.101.898.976,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	9.469.197.074,00	10.258.296.440,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.906.661.717,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.737.451.321,00</b>	<b>10.681.047.855,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>24.155.338.283,00</b>	<b>208.153.876,00</b>	<b>37.397.479.372,00</b>	<b>20.586.990.511,00</b>	<b>18.402.093.920,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun</b>					

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perencanaan yang baik mempunyai sasaran dan prioritas yang jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Dalam melaksanakan pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing wilayah dan daerah mempunyai keterbatasan, baik dari pendanaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh karena itu dalam setiap rencana pembangunan perlu ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Prioritas dan sasaran pembangunan juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sasaran merupakan rumusan penjabaran dari tujuan organisasi secara lebih spesifik dan terukur dengan fokus utama pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, sementara prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti.

Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2026 ini merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD Tahun 2025- 2029 Kabupaten Tapanuli

Tengah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026.

***“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”.***

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
2. PDRB per kapita (juta);
3. Kontribusi PDRB Provinsi;
4. Tingkat Kemiskinan;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
6. Indeks Rasio Gini;
7. Indeks Modal Manusia;
8. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta

tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

**Tabel 4.1**  
**17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat**

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.</li> <li>2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.</li> <li>3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.</li> <li>4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.</li> <li>5. Pemberantasan kemiskinan.</li> <li>6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.</li> <li>7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.</li> <li>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.</li> <li>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.</li> <li>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</li> <li>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.</li> <li>2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.</li> <li>3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.</li> <li>4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.</li> <li>5. Melanjutkan dan menambahkan program</li> </ol>

<p>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</p> <p>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</p> <p>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</p> <p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga</p>	<p>kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</p> <p>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</p> <p>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</p>
--	--

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara**

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 mengangkat tema

***“Pemantapan Pencapaian Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”.***

Prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjawab permasalahan belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender serta perlindungan anak

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam rangka menjawab permasalahan belum optimalnya angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelatihan ketenagakerjaan, pertumbuhan UKM dan IKM baru, akses tenaga kerja terhadap dunia usaha, kesejahteraan petani dan produktivitas serta daya saing pariwisata

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Dalam rangka menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, layanan sistem transportasi dan penurunan risiko bencana.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif.

Dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberlanjutan akuntabilitas dan aset daerah, peningkatan pelayanan publik, kualitas dan manajemen ASN serta kualitas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

#### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan jangka panjang, sementara Misi menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui program dan kebijakan terukur. Keduanya harus spesifik, terukur, dan selaras dengan tantangan aktual (seperti regenerasi petani atau adaptasi iklim) untuk memastikan implementasi efektif. Keberhasilan ditunjukkan oleh konsistensi antara pernyataan visi-misi dengan alokasi sumber daya dan capaian kinerja. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tapanuli Tengah yang telah ditetapkan maka harus ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

**Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban**

Visi tersebut memiliki makna, yaitu :

1. Adil untuk Semua

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Lestari

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang asri memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal

3. Berkeadaban

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 9 misi pembangunan jangka menengah. Adapun 9 misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter dan berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.
2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani.  
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.  
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah.

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban.

Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang sama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah.

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 :

**Tabel 4.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>Visi : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing.	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah. 2. Meningkatkan literasi masyarakat
		2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha	1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha

<b>Visi : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
2	Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani	1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif 3. Menurunnya angka stunting
3	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya ketimpangan pendapatan 2. Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat 3. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok 4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan petani 2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan 3. Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal 4. Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)
4	Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatnya daya saing industry 2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

<b>Visi : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi	yang berdaya saing	3. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif 4. Meningkatnya nilai tambah perdagangan 5. Meningkatnya literasi digital masyarakat
		2. Meningkatkan kemandirian daerah	1. Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah 2. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah
5	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban	1. Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya profesionalitas ASN 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM
6	Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam	1. Mewujudkan masyarakat yang	1. Terwujudnya keluarga yang berkualitas 2. Terwujudnya berkebudayaan maju

<b>Visi : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia	berbudaya dan harmonis	3. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
7	Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 2. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau 3. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 4. Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana
8	Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan	1. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup 2. Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan 3. Meningkatnya pengelolaan sampah 4. Menurunnya emisi gas rumah kaca

<b>Visi : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	kelestarian lingkungan hidup		
9	Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi	1. Mewujudkan pembangunan desa yang merata	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026, diarahkan untuk pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diukur melalui Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

**Tabel 4.3**  
**Sasaran Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026**

<b>Sasaran Indikator Makro</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Kabupaten Tapanuli Tengah</b>
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,2	4,34-4,5
2. PDRB per Kapita (juta)	83,2 – 85,7	56,83
3. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	5,2	1,25
4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 – 5,60	9,68-8,99
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 – 5,59	7,54-7,41
6. Rasio Gini	0,284 – 0,290	0,227-0,237
7. Indeks Modal Manusia / IPM	0,55	74,91 – 77,16
8. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 – 2,77	NA
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	81,98

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten

Tapanuli Tengah. Selain itu, indikator makro Kabupaten Tapanuli Tengah juga menjadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Penetapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut menjadi acuan penetapan program dan kegiatan sebagai bentuk perwujudan strategi yang telah dirumuskan. Sebagai bentuk perwujudan strategi utama pembangunan ditetapkan program prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun yang disesuaikan dengan tema dan arah pembangunan.

**Tabel 4.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah**

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri</b>			
1.1	Meningkatnya intelegualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dan mengembangkan kurikulum pendidikan berkarakter
			Memberikan bantuan beasiswa sebagai akses pendidikan yang merata kepada keluarga kurang mampu dan berprestasi
			Merevitalisasi sekolah dengan fasilitas yang memadai dan memiliki akses untuk internet dan perpustakaan digital
1.1	Meningkatnya literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas untuk mengikuti gerakan literasi ilmiah
			Mempersiapkan akses internet gratis di ruang publik untuk langganan perpustakaan digital
1.2	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Membangun dan mempersiapkan perpustakaan desa, taman baca masyarakat serta pojok baca di ruang terbuka publik
			Memperkuat fungsi balai latihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal
1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah	Memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
			Memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha atau bekerja mandiri
<b>Misi 2: Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani</b>			
2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan dan upaya promotif-preventif kesehatan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan	Memberikan pelayanan inovasi bisnis dan inkubator usaha bagi wirausaha pemula
			Memperkuat pelayanan Puskesmas dan tenaga medis yang memadai dengan akses yang mudah dari seluruh kecamatan
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta berkecukupan gizi
			Memperkuat deteksi penyakit menular dan tidak menular serta penanganan permasalahan kesehatan yang lebih baik
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan kepada masyarakat	Memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat
			Memastikan masyarakat telah memiliki akses BPJS Kesehatan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadilan			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
			Meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita
			Memberikan pemeriksaan kehamilan gratis secara berkala untuk deteksi dini stunting
			Menyediakan sarana air bersih dan akses air minum layak
<b>Misi 3: Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif</b>			
3.1 .1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menerapkan kebijakan fiskal progresif dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah	Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif kepada masyarakat untuk berwirausaha  Meningkatkan keterampilan kerja melalui kemitraan dan pelatihan vokasional
3.1 .2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Memperluas jaminan sosial dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelayanan sosial  Memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran
3.1 .3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mengoptimalkan sistem distribusi dan stok pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga	Mendistribusikan pangan secara merata ke seluruh wilayah sesuai kebutuhan  Menguatkan pengawasan terhadap jaringan distribusi pangan
3.1 .4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mendukung produktivitas pertanian melalui teknologi tepat guna dan perbaikan infrastruktur penyimpanan	Mempersiapkan kawasan pertanian terpadu untuk peningkatan produktivitas pangan daerah  Mempersiapkan diversifikasi sumber pangan lokal
3.2 .1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Memberikan akses harga yang adil dan pelatihan agribisnis bagi petani kecil	Memberikan subsidi alat dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah  Mengembangkan rantai distribusi yang lebih optimal untuk pemasaran hasil pertanian
3.2 .2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Menyediakan sarana tangkap modern dan akses pasar yang luas untuk nelayan tradisional	Mempersiapkan bantuan peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan  Memberikan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan yang memberikan nilai tambah kepada nelayan dan masyarakat
3.2 .3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Mendorong kebijakan inklusif dan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas	Meregulasi kebijakan kuota minimal bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja disabilitas  Memberikan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital untuk penyandang disabilitas  Meregulasi lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas
3.2 .4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Menyediakan perlindungan sosial dan program pengembangan keterampilan untuk pekerja informal	Memberikan perlindungan sosial yang layak bagi tenaga kerja rentan dalam sektor informal  Memberikan pelatihan bagi tenaga kerja informal untuk memperluas peluang kerja formal
<b>Misi 4: Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi</b>			
4.1 .1	Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik yang terintegrasi	Mengembangkan kawasan industri terpadu berbasis potensi daerah  Meningkatkan infrastruktur logistik yang lebih baik untuk kelancaran distribusi barang
4.1	Meningkatnya nilai tambah	Mengembangkan	Mengelola daya tarik dan destinasi wisata dengan

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
.2	pariwisata dan ekonomi kreatif	pariwisata dan kebudayaan, serta karya ekonomi kreatif dengan kearifan lokal	konsep berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya lokal Memberikan pelatihan dan pengembangan desa wisata melalui keterlibatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama Mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan festival budaya sebagai daya tarik wisata
4.1 .3	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Menyederhanakan regulasi serta memberikan insentif yang menarik bagi investor	Mempersiapkan penawaran peluang investasi kepada para investor melalui penyusunan potensi investasi daerah Meningkatkan akses konektivitas antar wilayah Memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah pada sektor-sektor unggulan
4.1 .4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Memperkuat rantai pasok dan memperluas jaringan distribusi dalam negeri dan ekspor	Penguatan nilai tambah melalui hilirisasi produk-produk lokal Peningkatan akses menuju pasar lokal, luar daerah, nasional dan internasional
4.1 .5	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Menyediakan jaringan internet dan telekomunikasi di seluruh daerah khususnya pada area blank spot Memberikan sosialisasi dan edukasi digital bagi seluruh masyarakat secara berkala
4.2 .1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan potensi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan efisiensi pajak daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
4.2 .2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan profesionalisme manajemen dan inovasi layanan di BUMD agar lebih kompetitif dan produktif	Meningkatkan kualitas tata kelola BUMD Menginisiasi diversifikasi bisnis dan inovasi
<b>Misi 5: Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban</b>			
5.1 .1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Menguatkan sistem e-government yang terbuka dan mekanisme pelaporan publik secara real-time	Meningkatkan penerapan e-government dalam memberikan transparansi layanan publik Memperkuat kapasitas unit pemberantas korupsi terutama pada urusan yang rawan terhadap korupsi
5.1 .2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja berbasis kompetensi	Memperkuat pelaksanaan penilaian kinerja ASN berbasis kompetensi dan meritokrasi Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada ASN untuk membangun kompetensi dan profesionalitas diri Membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penilaian pemberian pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan
5.1 .3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif dan berbasis data dalam proses perencanaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan analisis kebijakan publik
5.1 .4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam program sosialisasi dan sekolah	Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Meningkatkan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia melalui hukum yang berkeadilan

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadilan			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 6: Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia</b>			
6.1 .1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan edukasi parenting dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan	Memberikan layanan konseling keluarga dalam membina perilaku rumah tangga yang harmonis Membangun kebijakan yang memberikan keseimbangan work-life balance kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga Memberikan edukasi parenting bagi orang tua untuk mengoptimalkan pola asuh positif di lingkungan keluarga
6.1 .2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Meningkatkan pelestarian cagar budaya daerah	Mempersiapkan pusat kebudayaan dan galeri seni untuk melestarikan warisan budaya daerah Membangun integrasi budaya dalam pendidikan berbasis kurikulum muatan lokal berkarakter dan berbudaya Membangun sinergi dengan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya daerah
6.1 .3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Menguatkan regulasi dan kampanye kesetaraan gender serta layanan perlindungan anak yang responsif.	Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di lingkungan kerja Membangun kebijakan penegakan hukum terhadap kasus bullying, kekerasan anak dan eksploitasi anak
<b>Misi 7: Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya</b>			
7.1 .1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan prioritas wilayah tertinggal dan padat penduduk	Mengoptimalkan perluasan akses jaringan listrik dan air bersih untuk menjangkau seluruh wilayah Tapanuli Tengah Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas desa dan kecamatan
7.1 .2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan moda transportasi massal yang terintegrasi dan tarif yang ramah bagi masyarakat	Meningkatkan keamanan di jalan lintas dengan pemasangan rambu, penerangan jalan serta pemantauan pada daerah rawan kecelakaan Mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan modern untuk mendukung aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah dengan angkutan umum masif
7.1 .3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Mendorong pembangunan perumahan dengan konsep ramah lingkungan dan subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah	Mempersiapkan kemudahan akses kredit perumahan bersubsidi kepada masyarakat khususnya pekerja sektor informal dan UMKM Mewujudkan revitalisasi kawasan permukiman kumuh serta memberikan fasilitas air bersih dan sanitasi layak di seluruh rumah
7.1 .4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Menerapkan standar bangunan tahan bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini di daerah rawan	Mempersiapkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, khususnya banjir, longsor, gempa dan tsunami Memberikan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala kepada aparat dan masyarakat
<b>Misi 8: Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup</b>			
8.1 .1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menerapkan pengelolaan kawasan hijau dan pengawasan kualitas udara, air, dan lahan	Melaksanakan kebijakan konservasi hutan lindung dan normalisasi daerah aliran sungai Meningkatkan pengawasan terhadap limbah industri dan persampahan Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program gotong royong merawat lingkungan serta sadar lingkungan

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8.1 .2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Mengembangkan energi terbarukan dan mendorong efisiensi energi di berbagai sektor	Mempersiapkan pemanfaatan tenaga matahari dan angin untuk mendukung kebutuhan energi, khususnya pada sektor perikanan dan pertanian Mendorong reformasi perilaku hemat energi kepada masyarakat dan industri Mengoptimalkan konversi energi berbasis biomassa dan biogas dalam sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber energi
8.1 .3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Mengoptimalkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan edukasi pengurangan sampah di masyarakat	Menguatkan sistem pengelolaan sampah
8.1 .4	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Mendorong penggunaan teknologi rendah karbon dan restorasi ekosistem penyerap karbon	Meningkatkan bauran EBT pada sektor energi listrik dan transportasi
<b>Misi 9: Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi</b>			
9.1 .1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Mengembangkan badan usaha dan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi desa Memperkuat kelembagaan dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel Memperkuat perekonomian melalui produk unggulan di setiap desa Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.

Prioritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan potensi, kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori, kondisi umum daerah, dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi, kebijakan nasional, provinsi yang bersifat mandatori, kondisi umum daerah, dan permasalahan aktual secara global, maupun nasional maka Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah pada RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 adalah ***“PENGUATAN MODAL DASAR***

## ***PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN DAN INKLUSIF”.***

Pemerintah fokus untuk memperkuat modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil.

Tahun 2026 menjadi tahun yang difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai titik utama pembangunan di daerah. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan kebijakan transformasional baik dari ekonomi, sosial maupun tata kelola menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif. Dalam mencapai tema tahun 2026, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan
3. Transformasi ekonomi menuju Perekonomian Daerah Yang Mandiri
4. Pengoptimalan potensi Desa Dalam Mengembangkan Potensi Desa
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur layanan berkelanjutan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

### **4.2.1. Program Prioritas Daerah**

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Program Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah secara terpisah terdapat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029**

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri				
		1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pendidikan (Poin)
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi (Poin)
					Numerasi (Poin)
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)
					Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
		1.1.2	Meningkatkan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)
				Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional
		1.2	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
					Pertumbuhan Wirausaha	
<b>2</b>	<b>Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani</b>					
		2.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan (Poin)	
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
					Indeks Keluarga Sehat (Poin)	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
				Meningkatnya jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Perlindungan Sosial
<b>3</b>	<b>Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif</b>					
		3.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan		Gini Ratio (Poin)	
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Peranan Sosial	Rehabilitasi Sosial
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		3.1.4		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp juta)	
		3.2.1		Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi hortikultura	
					Peningkatan produksi komoditas peternakan	
		3.2.2		Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	
					Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3.2.3		Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
					Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial
		3.2.4		Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
					Meningkatnya jaminan sosial	Perlindungan Sosial
<b>4</b>	<b>Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi</b>					

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
		4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
		4.1.3	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor	Promosi Penanaman Modal
		4.1.4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) / Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		4.1.5	Meningkatnya literasi digital masyarakat		Indeks Masyarakat Digital (Poin)	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah		RoA BUMD (%)	
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5</b>	<b>Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban</b>					
		5.1	Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
				Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penataan Organisasi
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian Daerah
		5.1.3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPDP Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		5.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
<b>6</b>	<b>Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia</b>					
		6.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Pengendalian Penduduk	
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)
		6.1.2	Terwujudnya kebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional
		6.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	
					Indeks Perlindungan Anak (Poin)	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Peningkatan Kualitas Keluarga
<b>7</b>	<b>Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya</b>					
		7.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Poin)	
		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengelolaan Sumber Daya Air
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas (%)	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
				Meningkatnya penyediaan permukiman PSU	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Poin)	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana
<b>8</b>	<b>Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup</b>					
		8.1	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
		8.1.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		8.1.2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
					Porsi EBT dalam Bauran Energi	
		8.1.3.	Meningkatnya pengelolaan sampah		Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan
		8.1.4	Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi GRK (ton CO <sub>2</sub> eq)	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
<b>9</b>	<b>Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi</b>					
		9.1	Mewujudkan pembangunan desa yang merata		Persentase Desa Mandiri (%)	
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (Poin)	
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Penataan Desa

#### 4.2.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tapanuli Tengah, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2026, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**Tabel 4.6**  
**Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026**

PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 1: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	PK 3: Transformasi ekonomi menuju Perekonomian Daerah Yang Mandiri
PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP 1: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	PK 3: Transformasi ekonomi menuju Perekonomian Daerah Yang Mandiri
PN3: Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP 4: Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	PK 6: Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur layanan berkelanjutan
PN4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PP 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PK 2: Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP 1: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	PK 3: Transformasi ekonomi menuju Perekonomian Daerah Yang Mandiri
PN 6: Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 1: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	PK 4: Penguatan potensi Desa Dalam Mengembangkan Potensi Desa

PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	PP 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan tujuan pembangunan	PK 1: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP 5: Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	PK 2: Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

#### 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, maka wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Nasional, serta mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga;
2. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:
  - a. Kawasan strategis ekonomi;

- b. Kawasan strategis Sosial dan Budaya; dan
- c. Kawasan strategis lingkungan.

A. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi:

**Tabel 4.7**  
**Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah**

NO	KAWASAN STRATEGIS EKONOMI	TIPOLOGI	LOKASI
1	KSK Labuhan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas</li> <li>- Kawasan Industri</li> </ul>	Kecamatan Tapan Nauli
2	KSK Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan perikanan</li> </ul>	Kecamatan Sarudik Kecamatan Tapan Nauli Kecamatan Sorkam Barat Kecamatan Barus
3	KSK Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh</li> <li>- Kawasan pertanian</li> </ul>	Kecamatan Manduamas Kecamatan Kolang Kecamatan Badiri Kecamatan Sibabangun

B. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya meliputi:

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Cagar Budaya Barus di Kecamatan Barus dan Barus Utara. KSK ini merupakan kawasan konservasi warisan budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah

C. Kawasan Strategis Lingkungan meliputi

Kawasan Strategis Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Mursala di Kecamatan Tapan Nauli. ini merupakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten KSK Tapanuli Tengah

**Gambar 4.1**  
**Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah**



#### **4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Berikut pemetaan hasil POKIR DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah disesuaikan dengan tema prioritas serta kemampuan anggaran daerah

No	PRIORITAS/URAIAN	PERANGKAT DAERAH
	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam mencapai Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dilakukan melalui Pembangunan Kantor Lurah/ Kepala Desa, dan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta Pembangunan Dek Penahan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum
	Transformasi ekonomi menuju Perekonomian Daerah Yang Mandiri	
	Menuju Perekonomian Mandiri dibutuhkan Peningkatan Produksi Pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pengadaan Bantuan Pupuk, Pengadaan Bantuan Benih Padi Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dinas Pertanian
	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur layanan berkelanjutan	
	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan dibutuhkan Pembangunan Jalan Rabat Beton Peningkatan Jalan Lapen, Peningkatan Jalan Hotmix (AC - BC), Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Saluran Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan pada bidang Kesehatan, dan Lingkungan dibutuhkan Pembangunan Drainase, Pengadaan Tong Sampah dan Bak Smpah	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup

#### **4.2.5. Program Inovasi Daerah**

Program inovasi daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menciptakan terobosan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi birokrasi, dan pemanfaatan potensi daerah. Contohnya meliputi program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

##### **A. Tujuan Program Inovasi Daerah:**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan ide-ide inovatif. Mendorong terciptanya solusi kreatif untuk mengatasi permasalahan di daerah. Meningkatkan kemampuan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Memberikan inspirasi dan motivasi bagi aparatur pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

##### **B. Jenis-jenis Program Inovasi Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah :**

###### **1. Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintah,**

Pembayaran pajak online dengan cara Sinergi dan kolaborasi antara OPD Penghasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan PAD melalui kanal digital. Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Tapteng akan mengoptimalkan kerjasama dengan Bank Sumut sebagai penyedia layanan perbankan non tunai untuk mendukung ETPD di Kabupaten Tapteng.

**Gambar 4.2**  
**Launching Pembayaran Pajak Online**



Launching Pembayaran Pajak Online Oleh Pj. Bupati Tapanuli Tengah

2. Inovasi Bidang Kesehatan:

Program BALITAKU (Bayi Baru Lahir Dapat Akta Dan Kartu Keluarga) bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Dinas Dukcapil Bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan.

**Gambar 4.3**  
**Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Balitaku**



Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Balitaku kerjasama Disdukcapil dan Fasilitas Kesehatan

3. Inovasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

Penerapan Aplikasi SISKAS (Sistem Informasi Manajemen) PDAM MUAL NAULI Kabupaten Tapanuli Tengah, bertujuan untuk melakukan pencatatan, penagihan, kerusakan dan pembayaran pemakaian air pelanggan. Dengan adanya sistem ini, tentu PDAM akan mudah dikelola, mudah diintegrasikan. Kita ingin PDAM Mual Nauli, terus berinovasi dan memberikan kemudahan. Baik terhadap karyawan sendiri maupun pelanggan dan masyarakat. Tentu sistem ini sangat akurat, karena semua sudah tersistem.

**Gambar 4.4**  
**Rapat Pemanfaatan Aplikasi SSKA PDAM Mula Nauli**



Rapat Pemanfaatan Aplikasi SSKA PDAM Mula Nauli dipimpin Oleh Pj. Bupati Tapanuli Tengah

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada memperkuat modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil. Maka dijabarkan pada urusan dan pendanaan pada setiap Perangkat Daerah yang terdiri atas:

#### **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :**

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
5. RSUD.
6. Satpol PP.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sosial.

#### **B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:**

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketahanan Pangan.
3. Lingkungan Hidup.
4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. Perhubungan.
  8. Komunikasi dan Informatika.
  9. Koperasi dan UKM.
  10. Perizinan.
  11. Kepemudaan dan Olahraga.
  12. Perpustakaan.
  13. Tenaga Kerja.
- C. **Urusan Pilihan**, yaitu:
1. Kelautan dan Perikanan.
  2. Pariwisata.
  3. Pertanian.
  4. Perindustrian dan Perdagangan.
- D. **Pendukung Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Sekretariat Dewan.
  2. Sekretariat Daerah.
- E. **Penunjang Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Badan Perencana Pembangunan Daerah.
  2. BPKPAD.
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- F. **Pengawasan**, yaitu:
1. Inspektorat.
- G. **Kewilayahan**, yaitu meliputi 20 Kecamatan.
- H. **Pemerintahan Umum**, yaitu :
1. Bakesbang.

Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah antara RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 ditunjukkan dari tabel berikut ini:

Tabel 5.1  
Konsistensi Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

RPJMD TAHUN 2026				RKPD TAHUN 2026				KET		
Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET			
1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Poin	74,91-77,16	1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Poin	74,91-77,16	
1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi	Poin		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi	Poin		
1.2	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54-7,41	1.2	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54-7,41	
1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/jiwa		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/jiwa		
1.2.2	Meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,9	1.2.2	Meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,9	
2.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,786-0,789	2.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,786-0,789	
2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun		
2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	%	98,6	2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,6	



		nasional								
2.1.3	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,85	2.1.3	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,85	
3.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	9,68-8,99	3.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	9,68-8,99	
3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0,227-0,237	3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0,227-0,237	
3.1.2	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%		3.1.2	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%		
3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita	34,62		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita	34,62		
3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Poin		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Poin		
3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Poin		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Poin		
3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%		
3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	98,6	3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	98,6	
4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,34-4,5	4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,34-4,5	
4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,04-12,24	4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,04-12,24	
4.1.2	Meningkatnya nilai	Rasio PDRB	%	1,35-1,42	4.1.2	Meningkatnya nilai tambah	Rasio PDRB	%	1,35-1,42	



	tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum				pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum			
4.1.5	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital	Poin	40,34	4.1.5	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital	Poin	40,34	
4.2	Meningkatkan kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10,25	4.2	Meningkatkan kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10,25	
4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,4-0,5	4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,4-0,5	
5.1	Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,37	5.1	Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,37	
5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,5-71,5	5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,5-71,5	
6.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin		6.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin		
6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	49,12-57,64	6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	49,12-57,64	
6.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,398-0,444	6.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,398-0,444	
7.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Poin	66,42	7.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Poin	66,42	
7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin		
8.1	Mewujudkan pembangunan yang	Indeks Kualitas Lingkungan	Poin	81,98	8.1	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	81,98	



	berwawasan lingkungan hidup	Hidup				lingkungan hidup				
8.1.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Poin		8.1.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Poin		
8.1.2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%		8.1.2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%		
8.1.3.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%		8.1.3.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%		
8.1.4	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi GRK	ton CO2eq		8.1.4	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi GRK	ton CO2eq		
9.1	Mewujudkan pembangunan desa yang merata	Persentase Desa Mandiri	%	0,63	9.1	Mewujudkan pembangunan desa yang merata	Persentase Desa Mandiri	%	0,63	
9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,632	9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,632	

## 5.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan perangkat daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pendanaan perangkat daerah umumnya bersumber dari berbagai alokasi anggaran, seperti DAU, DAK maupun BKP. Berikut disajikan tabel 5.2 terkait dengan Total Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 dan Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yang terintegrasi dengan SIPD-RI:

**Tabel 5.1**  
**Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU TAHUN 2026
1	Dinas Pendidikan	375.427.254.130,00
2	Dinas Kesehatan	185.310.239.967,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	77.685.727.457,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43.556.861.811,24
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	4.889.037.807,27
6	Satuan Polisi Pamongpraja	12.146.172.646,48
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.206.191.301,05
8	Dinas Sosial	4.372.250.545,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.741.686.522,48
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.469.778.543,92
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.878.532.987,92
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.159.903.313,77
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.568.040.838,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17.205.868.834,96
15	Dinas Perhubungan	15.635.961.966,83
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.032.483.934,24
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.025.486.131,79
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.017.748.847,96
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	2.625.916.754,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.543.272.194,32
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.490.273.058,00
22	Dinas Pariwisata	2.821.768.126,22
23	Dinas Pertanian	11.504.849.262,85
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.016.587.309,10

25	Dinas Ketenagakerjaan	4.882.467.136,95
26	Sekretariat Daerah	34.364.936.671,49
27	Sekretariat DPRD	27.266.412.886,99
28	Bappeda	6.395.872.887,83
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	248.948.849.638,90
30	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.005.104.156,81
31	Inspektorat	10.408.275.488,61
32	Kecamatan Pandan	15.108.211.177,83
33	Kecamatan Sarudik	4.002.921.495,07
34	Kecamatan Tukka	4.424.814.250,51
35	Kecamatan Badiri	2.600.912.932,98
36	Kecamatan Pinangsori	3.628.897.176,57
37	Kecamatan Lumut	1.308.599.964,87
38	Kecamatan Sibabangun	2.337.447.111,69
39	Kecamatan Sukabangun	884.434.528,90
40	Kecamatan Tapian Nauli	2.099.572.376,60
41	Kecamatan Sitahuis	1.899.399.625,03
42	Kecamatan Sorkam	2.874.217.298,94
43	Kecamatan Sorkam Barat	1.814.536.243,74
44	Kecamatan Kolang	2.196.460.521,88
45	Kecamatan Pasaribu Tobing	905.454.233,35
46	Kecamatan Barus	1.984.837.702,73
47	Kecamatan Sosorgadong	1.418.202.541,76
48	Kecamatan Barus Utara	876.581.899,85
49	Kecamatan Andam Dewi	1.228.089.808,49
50	Kecamatan Sirandorung	1.786.689.402,16
51	Kecamatan Manduamas	2.010.964.898,91
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.100.427.476,05
	<b>Total</b>	<b>1.207.095.485.826,90</b>

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

#### **6.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.1**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026**

No	Indikator Makro	Satuan	Target Kabupaten/Kota dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara			Target RPJMD Kabupaten/Kota		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,03	4,7	5,00-5,50	4,15	4,33-4,37	4,5-5,0
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	5,6	7,00-6,50	6,50-6,00	7,45	7,2-7	7,0-6,5
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,99	11,50-10,80 (11,05)	10,40-10,00 (10,30)	11,8	11,50-10,80 (11,05)	10,40-10,00 (10,30)
4.	Rasio Gini	Indeks	0,306	0,240-0,230	0,229	0,234	0,240-0,230	0,2369
5.	Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq <sub>2</sub>	25,47	142.489	162.597	na	142.488,58	180.195,16
6.	IPM	Poin	75,76	74,65	75,96	73,34	74,65	75,96



## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 dan target tahun 2026 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten**  
**Tapanuli Tengah Tahun 2026**

No	Indikator	Satuan	Tahun	Tahun Target
			2024	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	73,34	74,91-77,16
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,80	9,68-8,99
3	DRB Per Kapita	(Rp juta)	34,62	56,83
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,15	<b>4,34-4,5</b>
5	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	2,36
6	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Poin	NA	<b>71,89</b>
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	<b>76,90</b>
8	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	<b>66,42</b>
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	NA	<b>81,98</b>
10	Indeks Desa Membangun	Poin	<b>0,6023</b>	<b>0,6321</b>

## 6.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun	Target
			2024	2026
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
<b>I.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>			
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	73,01-73,21
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.23	4,50-4,75
3	PDRB per Kapita	NA	32,649	34,31

4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	NA	2,47
5	LPE kategori industri pengolahan	%	NA	4,783
6	LPE Sektor Pariwisata	%	NA	6,75
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,41	68,98
8	Indeks Risiko Bencana	-	187,85	177,70
9	Indeks Infrastruktur	-	NA	34,53
10	Tingkat Kemiskinan	%	11.50	10,33-11,33
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.81	6,25
12	Indeks Pengeluaran	-	NA	0,714
13	Indeks Gini	-	0.241	0,306
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	NA	57,67 (CC)
15	Nilai SAKIP	-	40,19	51,00 (CC)
16	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	51,08	86,7
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		NA	65,634
18	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	NA	62,50 (C)
19	Laju Inflasi	%	3,75	2
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	NA	3
21	Prevalensi stunting	%	23,8	23,3
<b>II.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
1	Indeks Pendidikan	-	0,672	0,732
2	Indeks Kesehatan	-	0,783	0,787
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
a) Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	63,56%	87,59%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	99,99%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,10%	99,20%

4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,79%	9,20 %
b) Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.03	0,05
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	94,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87	88
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92	93
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	62	91
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	38	45
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	46	60
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88	98,60
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	35	45
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95	97
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	44	49
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	61	62
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	35	49
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	16%	25,00%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73.54%	74,12%



3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	61.78%	68,14%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	43.75%	99,08%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	59.72%	66,62%
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100%	100,00%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100,00%
d) Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0%	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0%	100,00%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	28,59%	78,39%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,65%	4%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,430%	8,72%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00 %	100,00%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00 %	85,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	500 Orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	500 Orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	1350 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00 %	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 menit	15 menit
f) Sosial				



1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a) Tenaga Kerja</b>				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	26,32%	58,00%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,50%	0,90%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27'52%	48,00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,2%	4,4%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	2,8%	8,33%
<b>b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11%	10,90%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	59,09	20,94
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,92	18,36
<b>c) Pangan</b>				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	NA	2,20%
<b>d) Pertanian</b>				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	100,00%
2	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	4,00 %	TIDAK ADA

5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	100,00%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50 %	100,00%
e) Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	NA	74,56
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	NA	9,10%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	NA	77,50%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	perekaman KTP elektronik	%	91,46%	100,00%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,45%	44,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	49,04%	100,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	15,15%	36,49%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	57,86%	59,05%
2	Persentase peningkatan status desa mandiri'	%	42,14%	50,59%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,74	2,91%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	58,18%	74,40%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,40%	12,66%
i) Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	56%	66%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	46%	51%
j) Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	6,25	28,00%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33,33	98%



3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	54,00	64%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,4%	60%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	65%	100,00%
l) Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	14,53%	19%
m) Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,79	2%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,12	7%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	NA	2 Medali
n) Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100,00%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
o) Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	45	60%
p) Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100%	100,00%
q) Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	NA	45,50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	NA	33,00
r) Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	NA	4,38%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	1,73%
<b>Urusan Pilihan</b>				
a) Kelautan dan Perikanan				



## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 serta rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang Tahun 2026. RKPD menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029. RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Pencapaian RKPD memerlukan sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026.

RKPD Tahun 2026 ini disusun untuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 dalam rangka menyepakati antara lain permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; arah kebijakan pembangunan; program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klasifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MASINTON PASARIBU**

